

**ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES) DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN
KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim
Riau



RUSTAM EFENDI
NIM. 10675005125

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2010

Abstarak
ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES) DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN
KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR

Oleh
RUSTAM EFENDI
Nim.10675005125

Penelitian ini dilakukan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar antara bulan Januari sampai Februari 2010.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya ataupun pihak yang akan terkena oleh dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diatur dalam UU RI No.25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005-NO.050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2005 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta Musrenbangdes yang terdiri dari seluruh stakeholder seperti pihak Pemerintah Desa ,pihak Kecamatan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, ketua RT/RW dan Kepala Dusun, ketua adat,pengusaha, kelompok tani, komite sekolah yang ada di desa yaitu sebanyak 72 orang responden.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai berada pada kategori kurang baik,dengan jawaban responden sebanyak 37,50%, sedangkan responden yang menjawab baik sebanyak 27,78% dan cukup baik sebanyak 34,72% saja Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara penulis juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai masih belum berjalan optimal. Kemudian hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum semuanya terealisasi oleh pihak pemerintah daerah. Selanjutnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah masih minimnya tingkat pendidikan para peserta serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(Musrenbangdes) ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ..	9
2.2 Desa	18
2.3 Pemerintahan Desa	21
2.4 Definisi Konsep	23
2.5 Konsep Operasional	25
2.6 Hipotesis	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Bentuk Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Populasi dan Sampel	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29

3.6 Teknik Analisa Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Tinjauan Sejarah Desa	31
4.2 Keadaan Geografis	32
4.3 Kondisi Kependudukan	33
4.4 Kondisi Pendidikan Penduduk	34
4.5 Mata Pencaharian Penduduk	37
4.6 Kehidupan Keagamaan	38
4.7 Adat Istiadat	40
4.8 Kondisi Pemerintahan Desa	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
5.1 Identitas Responden	44
5.1.1 Golongan Umur	44
5.1.2 Tingkat Pendidikan	45
5.1.3 Jenis Kelamin	47
5.1.4 Jenis Pekerjaan	47
5.1.5 Jumlah Peserta dan Narasumber	48
5.2 Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	
Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten	
Kampar	49
A. Tahapan Persiapan	50
1. Penetapan Jadwal Pelaksanaan	50
2. Penetapan Tempat Pelaksanaan	52

3. Penyusunan Agenda Pembahasan	54
4. Penetapan Calon Peserta	55
B. Tahapan Pelaksanaan	57
1. Perumusan Visi dan Misi Desa	57
2. Perumusan Tujuan dan Strategi Desa	59
3. Perumusan Kebijakan dan Program Desa	60
4. Perumusan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Desa	61
5. Pemaparan Rencana Kerja Masing-masing Narasumber	62
6. Pembahasan Rencana Kerja	64
7. Penetapan Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan	65
8. Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan dari Narasumber	67
5.3 Hambatan-hambatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	72
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia pada kenyataannya membawa pengaruh yang besar kepada persoalan kenegaraan. Salah satu aspek kenegaraan yang turut berubah adalah perubahan sistem hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yakni dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang melahirkan kebijakan otonomi daerah (Andi yusran 2007:1)

Kesungguhan pemerintah pusat tersebut dapat dilihat melalui dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004, di mana dalam Undang-undang ini memuat wewenang Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan, berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan

dalam melaksanakan berbagai bentuk pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah nusantara yang tercinta ini. Maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui forum yang disebut dengan nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan setiap tahunnya adalah merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang menitikberatkan pada pembahasan untuk mengsinkronisasikan rencana kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Agustus tahun 2005 Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disebutkan bahwa dalam rangka pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sistem Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Sebelum menyusun dokumen rencana pembangunan tersebut harus dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kemudian menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan dengan urutan sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
2. Penyiapan rancangan rencana kerja
3. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Sehubungan dengan tahapan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan daerah pada tingkat desa yaitu Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Desa Mayang Pongkai merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arahan pembangunan yang akan diusulkan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan di bawah koordinasi unsur Kecamatan. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut adalah berupa materi

kesepakatan dan komitmen sebagai bahan masukan utama penyusunan perencanaan rancangan pembangunan daerah baik untuk jangka panjang ataupun jangka menengah.(UU. No. 25 Tahun 2004)

Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Mayang Pongkai beserta seluruh komponen masyarakat, tentunya diharapkan kesepahaman dan persatuan seluruh komponen untuk membuat menyelenggarakan musrenbang ini dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga hasil dari Musrenbang tingkat Desa Mayang Pongkai ini bisa diusulkan serta terealisasi oleh pihak Kecamatan pada Musrenbang tingkat Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Desa Mayang Pongkai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang sedang giat-giatnya dalam menyelenggarakan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur desa dan tatanan pemerintahan desa maupun perekonomian masyarakat. Sehingga demikian partisipasi masyarakat dalam hal ini penduduk desa Mayang Pongkai harus berperan aktif dalam kegiatan ini.

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi, bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa di Desa Mayang Pongkai terjadi beberapa masalah yaitu:

Kurangnya tingkat partisipasi dari para pemangku kepentingan (*stake holder*) pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa Mayang Pongkai ini, sehingga permasalahan yang ada di desa tidak dapat diakomodir sepenuhnya pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Contohnya usulan kelanjutan

pembangunan mesjid raya desa tidak terealisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) melalui dana APBD Kabupaten kampar.

Kemudian permasalahan yang terjadi yaitu keterbatasan pengetahuan teknis para pihak pengambilan keputusan dalam menentukan daftar skala prioritas pembangunan pada pelaksanaan forum Musrenbang Desa, sehingga hal ini akan menjadi kendala dalam membuat daftar kegiatan prioritas pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Untuk melihat jumlah perencanaan pembangunan yang belum terealisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Rencana Target dan Realisasi Program Pembangunan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2009

No	Nama Dusun	Target Pembangunan	Relisasi pembangunan	Persentase
1	Dusun Sungai Wien	- Pembangunan 1 (satu) unit posyandu -Pembangunan jembatan menuju perkuburan -Pembangunan jembatan sei wien	-Pembangunan Jembatan sungai wien	100%
2	Dusun Lapangan	-Penambahan ruang belajar SD 044 -Penimbunan jalan -Lanjutan pembangunan masjid raya -Lanjutan pembangunan MDA	Lanjutan pembangunan MDA Nurul Ihsan Mayang Pongkai	40%
3	Dusun Kuala Lumpur	-Penambahan ruang belajar SD 045 -Pembangunan posyandu	-Penambahan ruang belajar SMPS LPM Mayang Pongkai	100%
4	Dusun Sungai Putaran	-Pengaspalan Jalan desa -Pembangunan Jembatan Jalan utama	Pengaspalan jalan desa	50%

Sumber : Kantor Desa Mayang Pongkai 2009

Dari tabel di atas terlihat dari sekian banyak program pembangunan yang diajukan, hanya beberapa program yang terealisasi. Di antara program yang terealisasi adalah pembangunan jembatan Sungai Wien yang 100% terlaksana dari dana APBD Kabupaten Kampar, kemudian lanjutan pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Mayang Pongkai yang terlaksana sekitar 40% dan pembangunan ruang belajar SMPS LPM Desa Mayang Pongkai terlaksana 100% serta pengaspalan jalan desa hanya terlaksana sekitar 50%.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musrenbang tingkat desa Mayang Pongkai yaitu pihak yang diundang seperti tokoh masyarakat, RT, RW, Kepala Dusun. Pihak Kecamatan dan Instansi tingkat desa tidak semuanya datang menghadiri pelaksanaan Musrenbang sehingga penyaluran aspirasi rencana pembangunan kurang maksimal serta pihak yang diundang oleh pihak pemerintahan desa tidak mewakili semua unsur masyarakat yang ada di desa.

Menurut pengamatan penulis pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa di Desa Mayang Pongkai tahun 2009 ini, dalam musyawarah tersebut yang vocal hanya beberapa orang saja. Inipun hanya didominasi oleh Kepala Desa dan pihak Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Sehingga dengan demikian suasana pelaksanaan Musrenbang kurang bergairah. Usulan-usulan terlihat sekali jarang terjadi sehingga suasana menjadi monoton. Seperti dalam pemaparan rencana kerja, terlihat sekali para Kepala Dusun yang hadir grogi dalam penyampaian program kerja masing-masing dusun. Dan juga pada tahap persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tingkat Desa Mayang Pongkai ini, Pemerintah Desa dalam penetapan calon peserta tidak mewakili seluruh komponen masyarakat yang ada pada desa yang bersangkutan. Kemudian juga permasalahan yang terjadi yaitu dalam penetapan waktu atau jadwal pelaksanaan Musrenbang Desa terjadi kemoloran waktu dari waktu yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah desa dengan Pemuka masyarakat serta dalam penetapan tempat pelaksanaan Musrenbang Desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul :”**Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar**”.

1.2 Perumusan Masalah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) oleh Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh penulis masih jauh dari apa yang diharapkan, sehingga perencanaan pembangunan hasil Musrenbang tingkat Desa tidak diakomodir oleh pihak Kecamatan. Untuk itulah perlu kajian tentang Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Mayang Pongkai, sehingga diketahui kekurangan-kekurangan selama ini.

Bertolak dari fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu: **Bagaimanakah Proses Pelaksanaan**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar,
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pemerintah desa dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan ilmu-ilmu yang diperoleh penulis selama perkuliahan khususnya ilmu Administrasi Negara.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi serta evaluasi bagi Desa Mayang Pongkai dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes)
- c. Sebagai penambah referensi bagi peneliti lain tentang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (Hanif Nurcholis dkk 2009:97)

Musrenbang desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Musrenbang Desa diadakan sekali dalam setahun yaitu pada bulan januari setiap tahunnya.

Musrenbang desa diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya,
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya; dan
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selain diikuti oleh unsur Pemerintah Daerah juga mengikutsertakan dan yang tak kalah pentingnya menyerap aspirasi masyarakat desa yang terkait.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Desa atau Kelurahan merupakan hal yang sangat substansi dalam pelaksanaan Musrenbang pada tahap Kecamatan sampai pada tahap daerah dan nasional. Sehingga dengan demikian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ditingkat desa haruslah dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga aspirasi masyarakat desa dapat diakomodir dalam pembangunan nasional. Dapat dikatakan juga musrenbang tingkat desa atau kelurahan merupakan ujung tombak dalam perencanaan pembangunan disuatu daerah bahkan nasional.

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa adalah dokumen rencana kerja desa yang berisikan :

- a. Prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh dana alokasi desa dan atau swadaya;
- b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan; dan
- c. Berita acara Musrenbang Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan juga forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan di daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan dalam penyusunan RAPBD tahunan. Penyusunan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara BAPPEDA dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah masing-masing.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman antar pelaku pembangunan tentang RKP dan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar satuan kerja perangkat pemerintah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Peserta Musrenbang Desa adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa seperti Ketua RT/RW, ketua adapt, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kepala sekolah, kepala puskesmas dan lain-lain. Sedangkan narasumber Musrenbang desa adalah kepala Desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala

Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang berada di desa dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Pada saat Musrenbang Desa diupayakan interaktif dialogis, sehingga membuka peluang warga untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka identifikasi masalah maupun potensi yang ada di masyarakat. Untuk memperjelas gambaran situasi yang ada di masyarakat, masalah dan potensi ini kemudian dikelompokkan berbagai bidang yaitu bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, serta pelayanan umum.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang meliputi 5 (lima) tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan,
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,
- c. Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota,
- d. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan,
- e. Pelaksanaan Musrenbang Nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 4 ini juga mengatur mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang diselenggarakan dengan 4 (Empat) tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut: ,

1. Tahapan Persiapan adalah kegiatan penetapan jadwal pelaksanaan dan tempat pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbangdes, agenda pembahasan, tim penyelenggara dan calon peserta Musrenbangdes

2. Tahapan Pelaksanaan adalah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang meliputi perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan strategi desa, perumusan kebijakan dan program desa, perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan, pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber, pembahasan rencana kerja dan penyampaian perkiraan-perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber serta penetapan skala prioritas kegiatan Pembangunan sesuai dengan plafon besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fokus penelitian ini adalah tentang seluruh proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perencanaan Daerah di tingkat Desa/Kelurahan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Menurut Handayani (1981: 127) dalam melakukan perencanaan terdapat tata bagian atau unsur perencanaan yang merupakan sistematika berpikir dalam perencanaan yaitu :

1. Hasil akhir (the end) yaitu spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran target perencanaan. Disini ditentukan apa yang ingin dicapai, bilamana kita akan mencapainya,
2. Alat-alat (the means) yaitu meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur dan prakteknya. Disini ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana,
3. Sumber-sumber (the resources) adalah meliputi kuantitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam-macam sumber antara lain tenaga kerja, keuangan, material, tanah dan sebagainya,
4. Pelaksanaan (implementation) yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan dan,
5. Pengawasan (control) adalah menentukan prosedur apa yang akan dilakukan dalam menentukan kesalahan, kegagalan daripada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

Sedangkan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami, baik dari segi ekonomi, sosial politik atau hukum (Nugroho 2006:10).

Lebih lanjut Nugroho (2006:141) mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan antara lain :

- a. Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara sektor ruang dan waktu serta sesuai kepentingan masyarakat

- b. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang disepakati
- c. Menghormati fungsi kelembagaan dan keterlibatan penyelenggara dan masyarakat
- d. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif.

Lebih lanjut Mubyarto (2000 : 246) mengatakan permasalahan dalam penekanan terhadap ketimpangan ekonomi sosial suatu daerah sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah yang memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat khususnya melalui program-program pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

Menurut Mukhtar dan Sajogio (2001 : 36) dikatakan bahwa Untuk menjawab tantangan pembangunan khususnya ketimpangan pembangunan dan ketimpangan antara golongan *the have* dengan *the have not* maka sekurang-kurangnya pemerintah harus memperhatikan :

- a. Bagaimana caranya meningkatkan kesempatan kerja yang selaras dengan upaya untuk memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor non-migas, terutama hasil laut dan pariwisata
- b. Bagaimana caranya membentuk serta mengembangkan sumber daya yang berkualitas
- c. Bagaimana caranya mengupayakan peningkatan kegiatan ekonomi disektor pertanian
- d. Bagaimana caranya mengurangi jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

- e. Bagaimana caranya meningkatkan, pemeratakan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya.

Menurut Mustofa Djaya (2002:115) proses pembangunan ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu sebagai berikut:

1. Ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan
2. Kebudayaan dan kebiasaan hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan
3. Tingkat kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai bangsa tersebut

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu mengadakan intervensi kebijakan terhadap lingkungan, khususnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ada tiga jenis dasar pelaksanaan pembangunan (Mustofa Djaya 2001:120) yaitu :

1. Pelaksanaan pembangunan secara langsung untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, dimana pemerintah melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pembangunan
2. Pelaksanaan pembangunan tidak langsung adalah berbagai keputusan atau perundang-undangan, pemerintah tidak melakukan sendiri pelaksanaan pembangunan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat sehingga bergerak ke arah yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai pembangunan

3. Pelaksanaan pembangunan campuran adalah pelaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan ataupun campuran keduanya untuk melaksanakan pembangunan secara bersama-sama.

Lebih lanjut dinyatakan Mustofa djaya (2002:121-122) dalam melaksanakan pembangunan disuatu wilayah dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Penyelenggaraan pembangunan fasilitas fisik adalah melaksanakan pembangunan fisik bagi prasarana dan sarana pedesaan untuk kemakmuran seluruh masyarakat seperti penyelenggraan pembangunan jalan, gedung/aula, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya
2. Penyelenggaraan fasilitas umum adalah penyelenggaraan pembangunan fasilitas umum seperti pemeliharaan ketertiban, keamanan, menjalin hubungan yang selaras dan harmonis.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa peningkatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara universal berfungsi melakukan analisa kebijaksanaan untuk mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan yang luas, berkesinambungan serta terus meningkat.

Pelaksanaan pembangunan dari berbagai bentuk pelaksanaan tersebut memerlukan pengendalian yang dapat diartikan sebagai upaya menjaga agar keseluruhan aturan ataupun rencana kegiatan dalam melaksanakan sebagaimana yang ditentukan dengan cara mengikuti atau memantau setiap perkembangan

pelaksanaan, menilai permasalahan yang terjadi, kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut secara efektif yang didukung oleh partisipasi masyarakat setempat.

Menurut SP Siagian (2000:35) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, baik dalam menyumbang uang, pemikiran atau ide maupun dalam bentuk sumbangan tenaga.

Sejalan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan masyarakat desa diharapkan berperan aktif dengan pemerintah desa dalam menyusun program-program pembangunan. Sehingga setiap pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksana akan sangat dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan tersebut akan terpelihara oleh masyarakat.

2.2 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangna untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2003, Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah kabupaten kampar.

Selanjutnya desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja,2002:19)

Sedangkan Menurut Soetardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang kuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.

Desa sebagai organisasi dalam dinamika kegiatan pembangunan tidak bisa luput dari menggunakan dari metode organisasi, administrasi dan manajemen sesuai dengan definisi organisasi yang merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya (Sugiyono, 2004:7) menyatakan Pembangunan Desa adalah seluruh usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan desa.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperjatkan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusianya dan daya dukung sumber dana dan alamnya. Supaya pembangunan desa dapat terealisasi oleh pemerintah daerah, pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat harus

mempunyai kesepakatan yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Desa.

Perencanaan yang baik dalam pembangunan desa harus melibatkan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada dalam desa yang bersangkutan. Sehingga dalam menentukan arah perencanaan pembangunan desa dapat dirumuskan dengan baik sesuai skala prioritas.

Studi yang terkandung dalam setiap sendi kehidupan masyarakat desa adalah adanya perubahan dan pertumbuhan ataupun perkembangan yang terjadi secara terus menerus atau berkesinambungan. Usaha manusia yang dituangkan dalam bentuk kegiatan secara terus menerus agar terjadi perubahan dan perkembangan kearah yang lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki pada umumnya disebut dengan pembangunan.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa itu sendiri. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana, bimbingan serta pengawasan yang didasarkan kepada keterangan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut sarana infrastruktur yang ada di desa. Adapun persyaratan pembangunan itu adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pembangunan akan lebih cepat diterima bila pembangunan tersebut diusulkan melalui orang-orang yang dihormati

2. Tujuan pembangunan akan diterima bila dirasakan pembangunan tersebut mudah diterima melalui proses belajar yang ada
3. Tujuan dari perubahan sosial dapat diakomodir oleh system nilai dan tradisi yang ada dianggap cukup memuaskan
4. Tujuan pembangunan akan diterima bila hal itu secara menyeluruh sesuai dengan pola-pola kepribadian individu anggota masyarakat.

Desa sebagai organisasi dalam dinamika kegiatan pembangunan tidak bisa luput dari menggunakan metode organisasi, administrasi dan manajemen sesuai dengan definisi organisasi yang merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama.

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
- c. Sekretaris Desa atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Kemudian pada Pasal 208 menjelaskan tentang tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Talizudulu Ndraha (2001:76) tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Membina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang penghayatan dan pengamalan pancasila, pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa yang sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah
3. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih luas
4. Menyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha dan kegiatan masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menciptakan daya guna sebesar-besarnya
5. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga kemasyarakatan
6. Mengusahakan terus menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditaati oleh penduduk desanya.

Dari uraian tugas –tugas diatas jelas betapa besarnya peranan kepala desa dan tanggungjawabnya yang harus dijalankan sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam hal perencanaan pembangunan pemerintah desa harus lah bersinergi dengan masyarakat supaya hasil dari pembangunan dapat dirasakan sepenuh hati oleh masyarakat desa.

Pemerintah desa merupakan juga simbol formil kesatuan masyarakat desa sebagai kesatuan penduduk, pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur

rumah tangganya sendiri(wewenang otonomi/ pemerintah sendiri) serta wewenang dan kesatuan sebagai pelimpahan serta bertahap dari pemerintah di atasnya.

Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (swadaya) dapat ditumbuhkan melalui partisipasi masyarakat dengan pemerintah desa dimana semangat adalah suatu sikap dari keputusan untuk melanjutkan dan kemampuan untuk menuntut cita-cita dari kelompok atau organisasi.

Jelaslah bahwa peran pemerintah desa yang sangat penting adalah timbulnya kesatuan gerak dan kerjasama yang baik antar sesama aparat serta dalam suatu organisasi pemerintah desa. Terutama lagi dalam pelaksanaan musrenbang ditingkat desa yang sangat menentukan kelanjutan pembangunan dimasa yang akan datang.

2.4 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa yang disingkat dengan Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan seluruh stakeholder desa baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa maupun pihak yang akan terkena dampak hasil

musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

2. Perencanaan Pembangunan adalah suatu kegiatan perencanaan yang berkenaan dengan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.
3. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
5. Pemerintah Desa adalah terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa lainnya.

2.5 Konsep Operasional

Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut. (Masri Singaribun, 2006:46)

Adapun yang menjadi indikator-indikator Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan dengan item-item sebagai berikut :
 - Penetapan jadwal pelaksanaan
 - Penetapan tempat pelaksanaan
 - Penyusunan agenda pembahasan
 - Penetapan calon peserta
2. Tahapan Pelaksanaan dengan item-item sebagai berikut :
 - Perumusan visi dan misi desa
 - Perumusan tujuan dan strategi desa
 - Perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan desa
 - Perumusan kebijakan dan program desa
 - Pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber
 - Pembahasan rencana rencana kerja
 - Penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan
 - Penyampaian perkiraan-perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2005:70)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta kerangka teori tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Mayang Pongkai diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai belum terlaksana secara optimal karena belum berfungsinya peran stake holder ”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain. (Sugiono, 2005 : 11)

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan setelah ujian seminar proposal.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Data Sekunder yaitu data-data dimana penlulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak yang terkait mengenai Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyeksubyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpukannya. (Sugiono, 2005 : 90)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila polulasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu apa yang dipelajari untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul repsentatif mewakili. (Sugiyono, 2005 : 91)

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh peserta yang diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Mayang Pongkai yang berjumlah 72 orang yang terdiri dari unsur pemerintahan desa, Kepala Dusun, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan organisasi masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda,utusan dari kecamatan, para kepala sekolah yang ada di desa, kepala puskesmas pembantu desa dan pejabat instansi yang ada di desa.

Melihat kecilnya jumlah populasi dari penelitian ini, maka tidak perlu diambil sampelnya. Adapun teknik penarikan sampelnya yaitu dengan sensus.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu peneliti mengadakan Tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh
- b. Quesioner, dalam hal ini penulis menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Mayang Pongkai
- c. Observasi yaitu melakukan peninjauan secara langsung lapangan serta mencatat secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian

3.6 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, maka analisa datanya menggunakan deskriptif kualitatif dengan persentase dan digambarkan pula dalam bentuk kata-kata atau kalimat terpisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hal tersebut dilakukan agar data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis memisah-misahkan data menurut jenisnya. Setelah

data terpisah menurut jenisnya, maka baru dilakukan kegiatan yang dinamakan meneliti data, setelah itu baru dianalisa dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian yang dilengkapi dengan tabel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Tinjauan Sejarah Desa

Desa Mayang Pongkai merupakan salah satu desa Transmigrasi yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kebanyakan dari masyarakat desa Mayang Pongkai pada dasarnya adalah masyarakat yang berasal dari Desa Pongkai yang berada di salah satu desa yang ada di kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan masyarakat asal pulau Jawa. Desa pongkai ini termasuk dari delapan desa yang ada di provinsi Riau yang tenggelam akibat bendungan yang dibangun untuk pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Setelah pemerintah memberikan ganti rugi tanah penduduk yang tenggelam tersebut, pemerintah menawarkan tiga pilihan untuk kelangsungan kehidupan dari masyarakat. Ketiga pilihan itu adalah sebagai berikut:

1. Pindah dengan pola bebas yaitu pindah sendiri kedaerah yang lebih tinggi dan masih berada dalam kawasan Kecamatan XIII Koto Kampar,
2. Pindah dengan pola dua yaitu pindah dengan ditransmigrasikan ke satu daerah dengan membuat atau menanam kebun karet yang akan ditanggung oleh pemerintah biaya kehidupan masyarakat tersebut hingga kebun karetnya menghasilkan dan tanpa dibebankan hutang,
3. Pindah dengan Tran Pir yaitu pindah ke daerah yang telah disiapkan pemerintah lahan perkebunan sawit dengan di bebaskan hutang sebesar Rp

11.000.000/KK selama empat tahun yang akan dibayar dengan hasil perkebunan sawit tersebut dengan cara pemotongan setiap bulan.

Desa Pongkai sendiri akibat tawaran pemerintah diatas terpecah menjadi tiga Desa, yaitu desa pongkai istiqomah yang mengikuti pola pindah bebas berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, desa Pongkai siberuang pindah dengan pola dua juga di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Mayang Pongkai sendiri mengikuti Trans Pir bersama dengan masyarakat yang berasal dari pulau Jawa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Masyarakat pindahan dari desa Pongkai tersebut sampai secara keseluruhan di desa Mayang Pongkai pada tahun 1997. dengan demikian mereka telah berdomisili selama lebih kurang 13 tahun di kawasan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

.

4.2 Keadaan Geografis

Desa Mayang Pongkai terletak di sebelah utara ibukota Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan luas wilayah 1439 ha. Adapun jarak dari desa Mayang Pongkai dengan ibukota Kecamatan yaitu 3,5 KM. sedangkan jarak ke ibukota Kabupaten 60 KM dan jarak ke ibukota Provinsi 42 KM.

Luas wilayah Desa Mayang Pongkai 1384 ha dengan bentuk tofografi tanah berbentuk daratan, sedangkan batas-batas wilayah Desa Mayang Pongkai yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Sakai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simalinyang

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penghidupan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Plasma

Dengan demikian, desa Mayang Pongkai luas wilayahnya sejak mulai ditempati hingga sekarang tidak pernah berkurang dan bertambah, dari perbatasab-perbatasan dengan desa-desa tetangga lainnya samapai tanah pertanian, perkebunan hingga dengan tanah pekarangan rumah penduduk. Sedangkan keadaan tanahnya yaitu rata dan agak bergelombang.

4. 3 Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk Desa Mayang Pongkai merupakan penduduk yang multi etnis. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ada di desa ini. Mulai dari suku melayu kampar (ocu), jawa, batak hingga sunda hidup di desa Mayang Pongkai ini. Mereka hidup dengan rukun dan saling bantu membantu. Kekompakan antar suku yang mendiami Desa Mayang Pongkai ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang saling bahu-membahu

membangun desa. Untuk lebih jelasnya suku yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.I

Jumlah Penduduk Menurut Etnis yang Ada di Desa Mayang Pongkai

No	Etnis	Jumlah	Persentase
1	Melayu Kampar	2146 orang	65,53%
2	Jawa	945 orang	28,85%
3	Sunda	120 orang	3,66%
4	Batak	64 orang	1,96%
Jumlah		3275 orang	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa masyarakat desa Mayang Pongkai merupakan masyarakat yang heterogen. Terlihat sebanyak empat (4) suku bangsa yang ada di negara kita ini hidup di desa ini. Mayoritas dari penduduk desa Mayang Pongkai adalah masyarakat suku melayu kampar yang berasal dari desa pongkai Kecamatan XIII Koto Kampar yang pindah kedaerah ini, kemudian disusul dari suku Jawa, Sunda dan Batak.

4.4 Kondisi Pendidikan Penduduk

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam suatu wilayah.

Pendidikan juga merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak setiap warga negara (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945)

Untuk lebih jelas tingkat pendidikan penduduk desa Mayang Pongkai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Mayang Pongkai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	40	5,40%
2	SD	260	35,13%
3	SLTP	210	28,38%
4	SLTA	170	22,97%
5	Perguruan Tinggi	60	8,12%
Jumlah		740	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk usia sekolah di Desa Mayang Pongkai mayoritas semuanya sekolah. Hal ini terlihat sekarang bahwa 40 orang atau 5,40% usia sekolah mengeyam pendidikan TK, kemudian 260 atau

sekitar 35,13% penduduk usia sekolah mengeyam pendidikan SD. Selanjutnya 210 atau 28,38% orang penduduk usia sekolah telah mengeyam pendidikan setingkat SLTP dan 170 atau 22,97% orang usia sekolah telah berpendidikan SLTA dan 60 atau 8,12% orang penduduk usia sekolah sedang menempuh pendidikan diberbagai perguruan tinggi.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Mayang Pongkai. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai. pada umumnya gedung-gedung sekolah di Desa Mayang Pongkai telah memadai dan dalam kondisi bagus.

Keadaan yang telah disebutkan diatas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerinta. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Mayang Pongkai

No	Sarana pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	1	16,66%
2	SD	2	33,33%
3	MDA	2	33,33%
4	TK	1	16,66%
Jumlah		6	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Mayang Pongkai berjumlah 6 buah dimana SLTP sebanyak 1 buah atau 16,66%,

SD sebanyak 2 buah (33,33%) dan MDA sebanyak 2 buah (33,33%) serta TK sebanyak 1 buah (16,66%). Dengan adanya sarana pendidikan yang memadai tersebut diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengeyam pendidikan sebagaimana program dari pemerintah yaitu pendidikan wajib 9 tahun.

4.5 Mata Pencaharian Penduduk

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Desa Mayang Pongkai mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani sawit. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Mayang Pongkai

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	1800	80,50%
2	PNS	35	1,57%
3	Pegawai Swasta	15	0,68%
4	TNI/Polri	6	0,26%
5	Buruh Tani	350	15,65%
6	Peternak	6	0,27%
7	Pedagang	20	0,90%
8	Montir	4	0,17%
Jumlah		2236	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel IV.4 diatas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Desa Mayang Pongkai terdapat 1800 orang (80,50%) bekerja sebagai petani, 35 orang (1,57%) bermata pencaharian sebagai PNS, 15 orang (0,68%) sebagai Pegawai Swasta, 6 orang (0,26%) sebagai TNI/Polri. Kemudian sebanyak 350 orang (15,65%) bekerja sebagai Buruh Tani, 6 orang (0,26%) sebagai peternak dan 20 orang (0,90%) bermata pencaharian sebagai Pedagang serta 4 orang (0,17%) berprofesi sebagai montir.

4.6 Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar manusia, kebebasan beragama di negara Republik Indonesia dijamin dalam dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari Pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah negara yaitu pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama yaitu :

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Agama juga merupakan hubungan antara makhluk dengan sang kholiq-Nya. Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkah laku kesehariannya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa agama merupakan pedoman dasar dan

pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syari'at agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Sebab apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai agama, maka masyarakat tersebut akan cepat mendukung perbuatan itu serta sanksi akan diberikan apabila melanggarnya.

Dari data pemeluk agama di Desa Mayang Pongkai terdapat dua agama yang dianut oleh penduduk yaitu Islam dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5

Jumlah Pemeluk Agama di Desa Mayang Pongkai

No	Agama	Jumlah pemeluk	Persentase
1	Islam	3265	99,70%
2	Kristen katolik	10	0,30%
Jumlah		3275	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa agama yang ada di Desa Mayang Pongkai sebanyak 2 agama dimana pemeluk agama Islam sebanyak 3265 orang (99,70%) dan Kristen katolik sebanyak 10 orang (0,30%).

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung sarana tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain tempat

ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat peribadatan yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6

Jumlah Sarana Ibadah di Desa Mayang Pongkai

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	2	20%
2	Mushollah/surau	8	80%
3	Gereja	-	-
4	Wihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat 2 buah mesjid |(20%) dan 8 buah mushollah/Surau (80%) sebagai tempat ibadah umat islam. Sedangkan tempat ibadah pemeluk agama lain tidak ada di Desa Mayang Pongkai ini.

4.7 Adat Istiadat

Sebagai kelompok mayoritas, suku melayu kampar berasal dari desa Pongkai, mereka juga mempunyai beberapa suku adapt sebagaimana yang dimiliki oleh seluruh daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang kepala pada masing-masing suku. Kemudian dari

seluruh suku tersebut dikepalai oleh dua orang kepala adat yaitu dengan gelar Datuok Bosau dan Datuok Pobu yang disebut Pucuok Naghoi (Pucuk Negeri).

Adapun suku-suku yang ada di Desa Mayang Pongkai adalah sebagai berikut :

1. Suku Piliang terbagi menjadi dua suku yaitu piliang datuok paduko sindo dan piliang datuok sikuto majo
2. Suku Domo terbagi menjadi tiga suku yaitu Domo Datuok Majo Bosau, Datuok Tan Sumajo dan Domo Datuok Paduko
3. Suku Melayu terbagi pula menjadi tiga suku yaitu Melayu Datuok Eno, Melayu Datuok Sinaro Kayo dan Melayu Datuok Majo Kayo
4. Suku Patopang mempunyai satu orang Datuok yaitu Datuok Jilanso

4.8 Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah Pemerintahan Desa Mayang Pongkai terbagi atas empat Dusun yaitu Dusun Lapangan, Dusun Sungai Putaran dan Dusun Kuala Lumpur serta Dusun Sungai Wien. Sedangkan RT sebanyak 25 dan RW sebanyak 8, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7

Jumlah RT, RW dan Dusun di Desa Mayang Pongkai

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Putaran Utama	2	7
2	Dusun Lapangan	2	8
3	Dusun Kuala Lumpur	2	6
4	Dusun Sungai Wien	2	4
Jumlah		8	25

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap dusun mempunyai 2 RW, kemudian dusun yang mempunyai jumlah RT terbanyak yaitu Dusun Lapangan sebanyak 8 RT, disusul oleh Dusun Putaran Utama sebanyak 7 RT dan Dusun Kuala Lumpur sebanyak 6 RT serta Dusun Sungai Wien sebanyak 4 RT.

Saat ini Desa Mayang Pongkai dipimpin oleh kepala desa yang bernama Julizar, SP dan dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Muhibbudin. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu pula oleh aparat desa yaitu beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.8

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Mayang Pongkai

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis kelamin
1	Julizar, SP	Kepala Desa	Sarjana S1	Laki-laki
2	Muhibbudin	Sekretaris Desa	SMA	Laki-laki
3	Afrianto	Kaur Pemerintahan	SMA	Laki-laki
4	Nurma	Kaur Kesra	SMA	Perempuan
5	Tugiman	Kaur Umum	SMA	Laki-laki
6	Jalinus	Kaur Keuangan	SMA	Laki-laki
7	Kaharudin	Kaur Pembangunan	SMA	Laki-laki
Jumlah				7 orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat aparat pemerintahan desa Mayang Pongkai memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik yaitu Kepala Desa seorang Sarjana S1 dan para bawahannya mempunyai jenjang pendidikan tingkat SLTA, sehingga dengan demikian diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai pelayan masyarakat serta dalam perencanaan pembangunan.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat penting bagi suatu daerah merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan desa untuk diusulkan pada Musyawarah tingkat berikutnya sampai menghasilkan suatu peraturan daerah yang akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang berjumlah sebanyak 72 orang.

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai identitas responden, maka penulis menyebarkan kuesioner kepada masing-masing responden. Berikut ini disajikan profil responden yang dikelompokkan atas umur, pendidikan, jenis kelamin tiap- tiap responden.

5.1 Identitas Responden

Adapun identitas responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.1.1 Golongan Umur

Untuk mengetahui pengelompokkan umur setiap responden dari jumlah keseluruhan responden yang berjumlah 70 orang dibagi berdasarkan tingkatan-tingkatan umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1

Identitas Responden Berdasarkan Pengelompokkan Umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	21 – 30	4	5,56%
2	31 – 40	22	30,55%
3	41 – 50	25	34,72%
4	51 – 60	18	25%
5	61 – 70	3	4,17%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel V.1 di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara 21-30 tahun berjumlah 4 orang atau 5,56%, responden yang berumur antara 31-40 berjumlah 22 orang atau 30,55%. Sedangkan responden yang berumur antara 41-50 berjumlah 25 orang atau 34,72%, responden yang berumur antara 51-60 berjumlah 18 orang atau 25% dan responden yang berumur antara 61-70 adalah berjumlah 3 orang atau 4,17% saja.

Dari keterangan tabel V.1 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar umur responden adalah berada pada usia produktif artinya usia yang paling energik baik dalam berfikir maupun dalam bekerja.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah menunjukkan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh responden yaitu mulai dari tingkat pendidikan paling bawah sampai

ketingkat pendidikan paling tinggi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	6	8,33%
2	SLTP/Sederajat	18	25%
3	SLTA/Sederajat	35	48,61%
4	D.III	4	5,55%
5	S.1	8	11,11%
6	Pasca Sarjana	1	1,39%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak pada pada tingkatan SLTA/Sederajat yang berjumlah 35 orang atau 48,61%,kemudian disusul oleh responden yang berpendidikan pada tingkat SLTP/Sederajat yaitu berjumlah 18 orang atau 25%. Selanjutnya disusul oleh responden yang berpendidikan pada tingkat sarjana Strata Satu(S.1) berjumlah 8 orang atau 11,11%, responden yang berpendidikan sekolah dasar (SD) berjumlah 6 orang atau 8,33% serta responden yang berpendidikan pada tingkat Pasca Sarjana yaitu hanya 1 orang saja atau 1,39%.

Dari keterangan tabel V.2 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas tngkatan pendidikan responden adalah SLTA/Sederajat dan

SLTP/Sederajat dan diurutan ketiga adalah Sarjana Strata satu, sehingga dalam memahami perencanaan pembangunan dan dalam bekerja lebih mudah menguasai dan mempunyai kreatifitas dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah.

5.1.3 Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel V.3

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	45	62,5%
2	Perempuan	27	37,5%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai adalah laki-laki berjumlah sebanyak 45 orang atau 62,5% dan perempuan sebanyak 27 orang atau 37,5%.

Jenis Pekerjaan

Adapun jenis pekerjaan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	54	75%
2	PNS/Pegawai Swasta	18	25%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas diketahui jenis pekerjaan responden yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Swasta sebanyak 18 orang atau 25% dan responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 54 orang atau 75%.

5.1.5 Jumlah Peserta dan Narasumber

Adapun jumlah peserta dan Narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5

Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Peserta dan Narasumber

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Peserta	64	88,89%
2	Narasumber	8	11,11%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta dalam Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai sebanyak 64 orang atau 88,89% sedangkan narasumber

berjumlah 8 orang atau 11,11%. Untuk narasumber dalam Musrenbangdes ini bersal dari utusan kecamatan, pihak pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5.2 Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan suatu forum musyawarah tahunan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya yang kemudian diajukan kepada Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) pada tingkat berikutnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi oleh desa yang bersangkutan.

Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional dinegara kita ini, oleh karena itu perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan dan pertimbangan secara matang. Keberhasilan pembangunan nasional kita akan terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan.

Melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini diharapkan pembangunan desa dapat digesa oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga diharapkan tidak ada lagi desa yang terkebelakang dan terisolasi di negara yang kita cintai ini.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar penulis menetapkan dua indikator penelitian yaitu sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terdapat empat kegiatan prioritas yaitu :

1. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musrenbangdes

Penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dilaksanakan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hanya pada bulan Januari saja. Untuk itu Pemerintahan Desa Mayang Pongkai harus bertindak secepat mungkin menetapkan jadwal pelaksanaan demi program pembangunan desa setiap tahunnya yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat selanjutnya.

Berdasarkan observasi langsung penulis dilapangan terlihat bahawa penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) setiap tahunnya sering terjadi penundaan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada rapat persiapan musrenbangdes antara

pihak Pemerintahan Desa Mayang Pongkai dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu sendiri masih dilaksanakan pada bulan Januari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, tetapi penundaan jadwal itu hanya harinya saja yang digeser.

Penundaan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) pada tahun 2010 ini dikarenakan bahwa ada suatu permasalahan yang sangat penting diselesaikan oleh pihak pemerintahan desa Mayang Pongkai yaitu terjadinya tawuran pemuda desa Mayang Pongkai dengan pemuda desa tetangga. Oleh karena itu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diundur harinya. (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Mayang Pongkai yaitu Bapak Julizar, SP pada tanggal 20 Februari 2010)

Kemudian dapat kita lihat pula jawaban dari responden mengenai penetapan jadwal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada tabel berikut ini :

Tabel V.6

**Jawaban Responden Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pada Tahapan
Persiapan Musrenbangdes**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	18	25%
2	Cukup baik	25	34,22%
3	Kurang baik	29	40,28%
Jumlah		72	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai pada kategori "Baik" sebanyak 18 orang responden atau 25% dan tanggapan responden pada kategori "Cukup Baik" sebanyak 25 orang atau 34,22% , sedangkan pada kategori "Kurang Baik" berjumlah sebanyak 29 orang atau 40,28%.

Penjelasan tabel diatas mengenai penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada tahapan persiapan dapat disimpulkan yaitu berada pada kategori kurang baik dimana 29 orang responden dari 72 orang responden penelitian ini memberikan jawaban kurang baik.

2. Penetapan Tempat Pelaksanaan Musrenbangdes

Pada tahapan penetapan tempat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai menurut pengamatan penulis dilapangan tidak begitu terjadi kendala dalam penetapan tempatnya. Ini terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya tempat yang digunakan adalah ruangan aula Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai itu sendiri.

Sejalan dengan fenomena yang terjadi dilapangan tersebut diatas, responden memberikan jawaban mengenai penetapan tempat pelaksanaan musrenbangdes sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel V.7

**Jawaban Responden Tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Pada
Tahapan Persiapan Musrenbangdes**

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	15	20,83%
2	Cukup Baik	29	40,28%
3	Kurang Baik	28	38,89%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai penetapan tempat pelaksanaan pada Tahapan Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai yaitu responden yang memberikan jawaban "Baik" sebanyak 15 orang atau 20,83% dan responden yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 29 orang atau 40,28% sedangkan responden yang memberikan jawaban "Kurang Baik" sebanyak 28 orang atau 38,89%.

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tempat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai adalah cukup baik,dimana 29 orang dari seluruh responden menjawab cukup baik. Sedangkan yang menjawab baik hanya 15 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 28 orang responden dari keseluruhan responden.

3. Penyusunan Agenda Pembahasan Sebagai Bahan Musrenbangdes

Pada tahapan penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terlihat bahwa pihak Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa Mayang Pongkai memberikan tugas kepada Sekretaris Desa (Sekdes) beserta stafnya untuk menyusunnya sangat lamban menyelesaikan tugasnya. Hal ini penulis melihat bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) kurang berpengalaman dalam hal ini dan juga kemampuan komputer beliau kurang bagus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Mayang Pongkai pada tanggal 20 Februari 2010 di Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai, beliau mengatakan bahwa untuk penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini perlu kemampuan komputer yang bagus, karena semua bahannya berhubungan dengan ketik mengetik menggunakan komputer. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan sangat rumit, sehingga para penyusunnya harus bekerja ekstra.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden mengenai penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8

**Jawaban Responden Tentang Penyusunan Agenda Pembahasan Sebagai
Bahan Musrenbangdes**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	25	34,72%
3	Kurang Baik	27	37,5%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang memberikan jawaban "Baik" pada penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musrenbangdes adalah sebanyak 20 orang atau 27,78%, selanjutnya yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 25 orang atau 34,72% dan yang memberikan jawaban "Kurang Baik" adalah sebanyak 27 orang atau 37,5%.

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dikategorikan Kurang baik. Hal ini dikarenakan terlalu lamanya pihak pemerintahan desa dalam menyusun agenda pembahasan sebagai bahan Musrenbangdes.

4. Penetapan Calon Peserta Musrenbangdes

Pada penetapan calon peserta Musrenbangdes penulis melihat bahwa, peserta yang diundang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di desa mayang pongkai. Terutama sekali kami yang terhimpun dalam

Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Desa Mayang Pongkai (Hipemapo) tidak pernah diundang pada pelaksanaan Musrenbangdes. Padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Desa Mayang Pongkai itu sendiri. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di desa Mayang Pongkai mengenai penetapan calon peserta secara keseluruhan telah mewakili unsur-unsur yang ada di desa.

Namun berbeda dengan pendapat responden mengenai jawaban responden mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes pada tahapan persiapan, mayoritas responden memberikan jawaban cukup baik. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9
Jawaban Responden Tentang Penetapan Calon Peserta Pada Tahapan
Persiapan Musrenbangdes

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	15	20,83%
2	Cukup Baik	34	47,22%
3	Kurang Baik	23	31,94%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.9 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab "Baik" mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes adalah sebanyak 15 orang atau 20,83%, selanjutnya yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 34 orang atau 42,22% dan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 23 orang atau 31,94%.

Berdasarkan keterangan tabel diatas memberikan gambaran bahwa dalam menetapkan calon peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) cukup baik.

B. Tahapan Pelaksanaan

Kemudian setelah persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) selesai, maka diselenggarakanlah tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dibuka oleh Kepala Desa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan agenda pembahasan pada tahapan pelaksanaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Visi dan Misi Desa

Perumusan visi dan misi suatu perencanaan pembangunan desa sangatlah menentukan arah pembangunan desa yang akan datang, baik rencana pembangunan jangka pendek dan menengah desa maupun rencana pembangunan

jangka panjang desa. Oleh sebab itu, perumusan visi dan misi desa harus diperhitungkan secermat mungkin sesuai dengan zaman yang maju sekarang ini.

Visi dan misi desa merupakan pandangan umum dalam setiap pembangunan desa, karena akan menentukan pembangunan desa dimasa yang akan datang. Visi desa yang baik akan menentukan keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

Adapun jawaban responden mengenai perumusan visi dan misi pada tahapan dalam pelaksanaan Musrenbangdes dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10

**Jawaban Responden Tentang Perumusan Visi dan Misi Dalam Tahapan
Penyusunan Dokumen Musrenbangdes**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	19	26,39%
2	Cukup Baik	22	30,56%
3	Kurang Baik	31	43,05%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden "Baik" tentang perumusan visi dan misi dalam tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah sebanyak 19 orang atau 26,39% dan responden yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 22 orang atau 30,56%. Sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" sebanyak 31 orang atau 43,05%.

2. Perumusan Tujuan dan Strategi Desa Mayang Pongkai dalam Musrenbangdes

Adapun jawaban responden tentang perumusan tujuan dan strategi dalam tahapan penyusunan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11

Jawaban Responden Tentang Perumusan Tujuan dan Strategi Desa dalam Pelaksanaan Musrenbangdes

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	22	30,56%
3	Kurang Baik	30	41,67%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dilihat jawaban responden tentang perumusan tujuan dan strategi desa dalam Musrenbangdes termasuk kategori "Baik" berjumlah 20 orang atau 27,78% dan yang menjawab "Cukup Baik" berjumlah 22 orang atau 30,56%, sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" berjumlah sebanyak 30 orang atau 41,67%.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat diberikesimpulan bahwa pada perumusan tujuan dan strategi desa dikategorikan kurang baik dimana mayoritas responden yaitu sebanyak 30 orang atau 41,67% menjawab kurang baik.

Hal tersebut diatas sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

yaitu Bapak Tugiman pada Tanggal 07 Maret 2010, beliau mengatakan bahwa dalam perumusan tujuan dan strategi desa sangat global/umun sekali. Sekarang yang diinginkan desa adalah benar-benar yang sangat mendesak sekali untuk dibangun dibangun.

3. Perumusan Kebijakan dan Program Desa

Untuk mengetahui jawaban responden tentang perumusan kebijakan dan program desa pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.12

Jawaban Responden Tentang Perumusan Kebijakan dan Program Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	14	19,44%
2	Cukup Baik	26	36,11%
3	Kurang Baik	32	44,44%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.12 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang perumusan kebijakan dan program pada tahapan pelaksanaan Musrenbangdes sebanyak 14 orang atau 19,44% dan yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 26 orang atau 36,11%, sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" yaitu sebanyak 32 orang atau 44,44%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan program dan kebijakan Desa Mayang Pongkai pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dikategorikan kurang baik.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi penulis pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), bahwa terlihat hanya beberapa orang saja yang begitu vocal dalam memberikan usulan mengenai perumusan Program dan kebijakan desa dimasa yang akan datang.

4. Perumusan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan desa tergambar oleh penulis pada saat mengikuti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bahwa terlalu banyak para peserta mengusulkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di masing-masing Dusun. Sedangkankan kalau kita koreksi kegiatan-kegiatan yang mereka ajukan tersebut tidak begitu penting sekali. Namun dalam merumuskan kegiatan tersebut penulis menilai cukup baik dan pihak pemerintah desa dengan kecamatan begitu selektif dalam merumuskan kegiatan pembangunan desa.

Kemudian Untuk mengetahui jawaban responden tentang perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan desa pada tahapan penyusunan dokumen dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.13

**Jawaban Responden Tentang Perumusan Kegiatan-kegiatan Pembangunan
Desa**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	26	36,11%
2	Cukup Baik	27	37,50%
3	Kurang Baik	19	26,39%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan desa berjumlah sebanyak 26 orang atau 36,11% dan yang menjawab "Cukup Baik" adalah sebanyak 27 orang atau 37,50% serta yang menjawab "Kurang Baik" adalah sebanyak 19 orang atau 26,39%.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tentang perumusan kegiatan pembangunan desa dikategorikan cukup baik, dimana dari 72 orang responden memberikan jawaban cukup baik yaitu sebanyak 27 orang responden.

5. Pemaparan Rencana Kerja Masing-masing Narasumber

Pemaparan rencana kerja merupakan pemaparan yang dilakukan oleh para narasumber seperti Kepala Desa, Camat serta Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam menentukan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) Desa

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, terlihat bahwa para narasumber dalam memaparkan rencana kerja begitu jelas. Sehingga kita yang mendengarnya dapat mengerti dengan baik untuk kemudian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat berpikir menyusun rencana berdasarkan pemaparan rencana kerja para narasumber .

Hal diatas sejalan dengan jawaban responden mengenai pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber. Mayoritas responden memberikan jawaban baik narasumber dalam memaparkan rencana kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.14

Jawaban Responden Tentang Pemaparan Rencana Kerja oleh Masing-masing Narasumber

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	30	41,67%
2	Cukup Baik	15	20,83%
3	Kurang Baik	27	37,50%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.14 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab baik dalam pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber adalah sebanyak 30 orang atau 41,67% dan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 15 orang atau

20,83%, sedangkan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 27 orang responden atau 37,50%.

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemaparan rencana kerja para narasumber dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan para narasumber dalam penyampaiannya begitu jelas dengan alasan-alasannya.

6. Pembahasan Rencana Kerja

Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pembahasan rencana kerja ini akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pembahasan rencana kerja dalam tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.15

Jawaban Responden Tentang Pembahasan Rencana Kerja

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	28	38,89%
3	Kurang Baik	24	33,33%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.15 terlihat bahwa responden yang menjawab baik tentang pembahasan rencana kerja adalah sebanyak 20 orang atau 27,78% dan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 28 orang atau 38,89% sedangkan yang menjawab Kurang Baik adalah sebanyak 24 orang atau 33,33%.

Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan rencana kerja termasuk pada kategori cukup baik, dimana 28 orang responden atau 38,89% dari 72 orang responden menjawab cukup baik.

7. Penetapan Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan menjadi hal yang sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan, kegiatan-kegiatan yang ditetapkan akan dilanjutkan ketingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berikutnya. Apakah kegiatan tersebut dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar atau dibiayai oleh swadaya masyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu dalam penetapan skala prioritas pembangunan harus memperhatikan kebutuhan yang mendasar bagi desa sekarang ini. Sehingga usulan pembangunan pada tingkat selanjutnya dapat terealisasi 100%.

Kemudian Untuk mengetahui jawaban responden tentang penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.16

**Jawaban Responden Tentang Penetapan Skala Prioritas Kegiatan
Pembangunan**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	13	18,05%
2	Cukup Baik	28	38,89%
3	Kurang Baik	31	43,06%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan adalah sebanyak 13 orang atau 18,05% dan yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 28 orang atau 38,89% dan yang memberikan jawaban "Kurang Baik" adalah sebanyak 31 orang atau 43,06%.

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat diberikan gambaran bahwa dalam penetapan skala prioritas pembangunan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu kurang baik. Hal ini sejalan dengan latar belakang masalah penelitian ini yaitu para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tidak mampu menetapkan skala prioritas pembangunan desa Mayang Pongkai, sehingga program-program yang diajukan hanya beberapa saja yang terealisasi dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.

Hal tersebut diatas tidak sejalan dengan penyampaian dari narasumber dari pihak Kecamatan Kampar Kiri Tengah bahwa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan harus mengedepankan yang lebih mendesak dilaksanakan atau dibangun sehingga program itu bisa terealisasi.

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Mayang Pongkai yaitu Bapak Julizar, SP pada tanggal 10 maret 2010 di Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai beliau mengatakan bahwa, dalam menetapkan skala prioritas pembangunan desa pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masing-masing peserta terutama para Kepala Dusun (Kadus) bersikeras untuk memasukkan program-program mereka yang kalau dicermati program tersebut tidak penting dibandingkan dengan program yang telah diajukan oleh pihak desa sendiri. Untuk sebagai contohnya yaitu pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lebih lanjut bapak Kepala Desa memaparkan kepada penulis. Kalau dicermati tidak begitu penting karena bisa saja digunakan balai desa sebagai pelaksanaan Posyandu tersebut dibandingkan dengan pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dimana para muridnya menumpang belajar sore digedung SDN 044 Desa Mayang Pongkai.

8. Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan Dari Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat diharapkan penjelasannya. Karena para narasumberlah yang mengetahui alokasi-alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu narasumber diharapkan mampu membawa para peserta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kearah yang lebih baik lagi.

Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) begitu bagus. Para narasumber menjelaskannya begitu gamlang dan jelas. Para narasumber menjelaskan kemampuan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, sehingga para peserta mengerti seberapa besar kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Kemudian narasumber memberikan gambaran bahwa, pendanaan pembangunan desa tidak 100% dari dana Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Provinsi Riau, namun pemerintah desa beserta masyarakat harus berpartisipasi dalam mencari kekurangan pendanaan tersebut. Dana yang dimiliki pemerintah sangat minim sekali, untuk itu perlu swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Masyarakat diharapkan bahu membahu dalam setiap kegiatan pembangunan desa dengan pemerintahan desa. Apalagi dengan hak otonomi desa yang dimiliki desa bertujuan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa lebih mandiri lagi.

Selanjutnya Untuk mengetahui jawaban responden tentang penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murenbangdes) di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.17

Jawaban Responden Tentang Penyampaian Perkiraan Kemampuan

Pendanaan Dari Narasumber

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	28	38,89%
2	Cukup Baik	27	37,50%
3	Kurang Baik	17	23,61%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang menjawab Baik tentang penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber adalah sebanyak 28 orang atau 38,89% dan yang memberikan jawaban Cukup Baik adalah sebanyak 27 orang atau 37,50%, sedangkan yang memberikan jawaban Kurang Baik hanya 17 orang atau 23,61% saja dari seluruh responden.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab baik pada penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan alasan bahwa narasumber dalam menyampaikan materinya sangat lugas dan tegas serta membuka cakrawala pemikiran dari para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyampaikan pendapat masing-masing.

5.3 Rekapitulasi Seluruh Jawaban Responden

Selanjutnya dapatlah disimpulkan rekapitulasi jawaban responden mengenai Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sebagai berikut ini :

Tabel V.18

**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tahapan Persiapan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa
Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar**

No	Tahapan Persiapan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penetapan Jadwal	18(25%)	25(34,22%)	29(40,28%)	72(100%)
2	Penetapan Tempat	15(20,83%)	29(40,28%)	28(38,89%)	72(100%)
3	Penyusunan Agenda	20(27,78%)	25(34,72%)	27(37,50%)	72(100%)
4	Penetapan Calon Peserta	15(20,83%)	34(47,22%)	23(31,94%)	72(100%)
Jumlah		68(23,61%)	113(39,23%)	107(37,16%)	288(100%)

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam tahapan persiapan Musrenbangdes responden memberikan jawaban baik sebanyak 68 orang responden atau 23,61%, sedangkan responden yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 113 orang atau 39,23% serta yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 107 orang atau 37,16%.

Kemudian dari keterangan tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai tahapan persiapan Musrenbangdes diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan persiapan Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai berada pada kategori cukup baik 39,23% dari seluruh jawaban responden.

Selanjutnya rekapitulasi jawaban responden mengenai tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai berikut ini :

Tabel V.19

**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tahapan Pelaksanaan
Musrenbangdes Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar**

No	Tahapan Pelaksanaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perumusan Visi dan Misi	19(26,39%)	22(30,56%)	31(43,05%)	72(100%)
2	Perumusan Tujuan Dan Strategi Desa	20(27,78%)	22(30,56%)	30(41,67%)	72(100%)
3	Perumusan Kebijakan dan Program Desa	14(19,44%)	26(36,11%)	32(44,44%)	72(100%)
4	Perumusan Kegiatan-kegiatan Pembangunan	26(36,11%)	27(37,50%)	19(26,39%)	72(100%)
5	Pemaparan Rencana Kerja Masing-masing	30(41,67%)	15(20,83%)	27(37,50%)	72(100%)
6	Narasumber Pembahasan	20(27,78%)	28(38,89%)	24(33,33%)	72(100%)
7	Rencana Kerja Penetapan	13(18,05%)	28(38,89%)	31(43,06%)	72(100%)
8	Skala Prioritas Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan Dari Narasumber	28(38,89%)	27(37,50%)	17(23,61%)	72(100%)
Jumlah		170(29,51%)	195(33,85%)	211(36,63%)	576(100%)

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.19 rekapitulasi jawaban responden mengenai tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai diatas terlihat bahwa responden yang memberikan jawaban baik sebanyak 170 orang atau 29,51% dan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 195 orang atau 33,85% serta yang memberikan jawaban kurang baik yaitu sebanyak 211 orang atau 36,63%.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai berada pada kategori kurang baik dimana secara keseluruhan yaitu sebanyak 211 orang responden atau 36,63% menjawab kurang baik.

5.3 Hambatan-hambatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Dari hasil penelitian dilapangan atau observasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), proses pelaksanaan Musrenbangdes terjadi beberapa hambatan-hambatan yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga dalam pelaksanaan menemui banyak kendala.
2. Kurangnya koordinasi Kepala Desa Mayang Pongkai serta sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat (Stakeholder) dalam mensukseskan

pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya.

3. Partisipasi para peserta yang telah ditetapkan dan telah diberikan undangan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat kurang sekali. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir hanya 70% dari seluruh undangan yang telah disampaikan oleh pihak Pemerintahan Desa Mayang Pongkai.

BAB VI

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menguraikan tentang hasil penelitian mengenai Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, pada bab ini penulis juga mengemukakan kesimpulan dan sara-saran dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan responden dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada Tahapan Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori cukup baik yaitu sebanyak 39,23%, dimana secara keseluruhan kategori ini berada pada jumlah tertinggi dibandingkan dengan kategori baik dan cukup baik.
- 2) Pada Tahapan Pelaksanaan Musrenbangdes dapat disimpulkan yaitu berada pada kategori kurang baik atau 36,63%.
- 3) Hambatan-hambatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai yaitu :
 - a. Masih rendahnya tingkat pendidikan peserta Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai sehingga dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes terjadi kendala.

- b. Kurangnya koordinasi serta sosialisasi Kepala Desa dengan seluruh elemen masyarakat (stakeholder) dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat atau peserta dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai.

6.2 Saran-Saran

- 1) Kepada pihak Pemerintahan Desa Mayang Pongkai agar pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dimasa yang akan datang lebih baik lagi dibandingkan sekarang ini.
- 2) Kepada seluruh elemen masyarakat desa Mayang Pongkai agar berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah
- 3) Kepada pembaca yang budiman diminta kritik dan saran yang membangun demi terciptanya sistem pembelajaran yang efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Mustofa, *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan Teori Dan Harapan*, Liberty, Jakarta, 2002
- Handayaniingrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, CV. Haji Mas Agung, 2003
- Kaho, Riwo, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo, 2001
- Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Ndraha, Talizuluhu, *Peranan Administrasi Desa Dalam Pembangunan*, Yayasan Dharma IIP, Jakarta, 2001
- Nugroho, Ryant, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Nurcholis, Hanif, dkk, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009
- Sugiyono, Prof, DR, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2005
- Sajogjo dan Mukhtar, *Masalah Penanggulangan Kemiskinan (Refleksi Dari Kawasan Timur Indonesia)*, Jakarta, PT. Puspa Swara, 2001
- Siagian, SP, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2004

Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa / Marga*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Yusron, Andi, *Desentralisasi Di Indonesia (Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin)*, Suska Press & Red-Post Press, Pekanbaru, 2007

PERATURAN-PERATURAN

UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU. No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Desa

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 0259/m. ppn/I/2005, 050/166/AJ Perihal Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia pada kenyataannya membawa pengaruh yang besar kepada persoalan kenegaraan. Salah satu aspek kenegaraan yang turut berubah adalah perubahan sistem hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yakni dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang melahirkan kebijakan otonomi daerah (Andi yusran 2007:1)

Kesungguhan pemerintah pusat tersebut dapat dilihat melalui dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004, di mana dalam Undang-undang ini memuat wewenang Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan, berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan

dalam melaksanakan berbagai bentuk pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah nusantara yang tercinta ini. Maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui forum yang disebut dengan nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan setiap tahunnya adalah merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang menitikberatkan pada pembahasan untuk mengsinkronisasikan rencana kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Agustus tahun 2005 Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disebutkan bahwa dalam rangka pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sistem Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Sebelum menyusun dokumen rencana pembangunan tersebut harus dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kemudian menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan dengan urutan sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
2. Penyiapan rancangan rencana kerja
3. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Sehubungan dengan tahapan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan daerah pada tingkat desa yaitu Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Desa Mayang Pongkai merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arahan pembangunan yang akan diusulkan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan di bawah koordinasi unsur Kecamatan. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut adalah berupa materi

kesepakatan dan komitmen sebagai bahan masukan utama penyusunan perencanaan rancangan pembangunan daerah baik untuk jangka panjang ataupun jangka menengah.(UU. No. 25 Tahun 2004)

Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Mayang Pongkai beserta seluruh komponen masyarakat, tentunya diharapkan kesepahaman dan persatuan seluruh komponen untuk membuat menyelenggarakan musrenbang ini dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga hasil dari Musrenbang tingkat Desa Mayang Pongkai ini bisa diusulkan serta terealisasi oleh pihak Kecamatan pada Musrenbang tingkat Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Desa Mayang Pongkai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang sedang giat-giatnya dalam menyelenggarakan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur desa dan tatanan pemerintahan desa maupun perekonomian masyarakat. Sehingga demikian partisipasi masyarakat dalam hal ini penduduk desa Mayang Pongkai harus berperan aktif dalam kegiatan ini.

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi, bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa di Desa Mayang Pongkai terjadi beberapa masalah yaitu:

Kurangnya tingkat partisipasi dari para pemangku kepentingan (*stake holder*) pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa Mayang Pongkai ini, sehingga permasalahan yang ada di desa tidak dapat diakomodir sepenuhnya pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Contohnya usulan kelanjutan

pembangunan mesjid raya desa tidak terealisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) melalui dana APBD Kabupaten kampar.

Kemudian permasalahan yang terjadi yaitu keterbatasan pengetahuan teknis para pihak pengambilan keputusan dalam menentukan daftar skala prioritas pembangunan pada pelaksanaan forum Musrenbang Desa, sehingga hal ini akan menjadi kendala dalam membuat daftar kegiatan prioritas pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Untuk melihat jumlah perencanaan pembangunan yang belum terealisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Rencana Target dan Realisasi Program Pembangunan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2009

No	Nama Dusun	Target Pembangunan	Relisasi pembangunan	Persentase
1	Dusun Sungai Wien	- Pembangunan 1 (satu) unit posyandu -Pembangunan jembatan menuju perkuburan -Pembangunan jembatan sei wien	-Pembangunan Jembatan sungai wien	100%
2	Dusun Lapangan	-Penambahan ruang belajar SD 044 -Penimbunan jalan -Lanjutan pembangunan masjid raya -Lanjutan pembangunan MDA	Lanjutan pembangunan MDA Nurul Ihsan Mayang Pongkai	40%
3	Dusun Kuala Lumpur	-Penambahan ruang belajar SD O45 -Pembangunan posyandu	-Penambahan ruang belajar SMPS LPM Mayang Pongkai	100%
4	Dusun Sungai Putaran	-Pengaspalan Jalan desa -Pembangunan Jembatan Jalan utama	Pengaspalan jalan desa	50%

Sumber : Kantor Desa Mayang Pongkai 2009

Dari tabel di atas terlihat dari sekian banyak program pembangunan yang diajukan, hanya beberapa program yang terealisasi. Di antara program yang terealisasi adalah pembangunan jembatan Sungai Wien yang 100% terlaksana dari dana APBD Kabupaten Kampar, kemudian lanjutan pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Mayang Pongkai yang terlaksana sekitar 40% dan pembangunan ruang belajar SMPS LPM Desa Mayang Pongkai terlaksana 100% serta pengaspalan jalan desa hanya terlaksana sekitar 50%.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musrenbang tingkat desa Mayang Pongkai yaitu pihak yang diundang seperti tokoh masyarakat, RT, RW, Kepala Dusun. Pihak Kecamatan dan Instansi tingkat desa tidak semuanya datang menghadiri pelaksanaan Musrenbang sehingga penyaluran aspirasi rencana pembangunan kurang maksimal serta pihak yang diundang oleh pihak pemerintahan desa tidak mewakili semua unsur masyarakat yang ada di desa.

Menurut pengamatan penulis pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa di Desa Mayang Pongkai tahun 2009 ini, dalam musyawarah tersebut yang vocal hanya beberapa orang saja. Inipun hanya didominasi oleh Kepala Desa dan pihak Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Sehingga dengan demikian suasana pelaksanaan Musrenbang kurang bergairah. Usulan-usulan terlihat sekali jarang terjadi sehingga suasana menjadi monoton. Seperti dalam pemaparan rencana kerja, terlihat sekali para Kepala Dusun yang hadir grogi dalam penyampaian program kerja masing-masing dusun. Dan juga pada tahap persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tingkat Desa Mayang Pongkai ini, Pemerintah Desa dalam penetapan calon peserta tidak mewakili seluruh komponen masyarakat yang ada pada desa yang bersangkutan. Kemudian juga permasalahan yang terjadi yaitu dalam penetapan waktu atau jadwal pelaksanaan Musrenbang Desa terjadi kemoloran waktu dari waktu yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah desa dengan Pemuka masyarakat serta dalam penetapan tempat pelaksanaan Musrenbang Desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul :”**Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar**”.

1.2 Perumusan Masalah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) oleh Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh penulis masih jauh dari apa yang diharapkan, sehingga perencanaan pembangunan hasil Musrenbang tingkat Desa tidak diakomodir oleh pihak Kecamatan. Untuk itulah perlu kajian tentang Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Mayang Pongkai, sehingga diketahui kekurangan-kekurangan selama ini.

Bertolak dari fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu: **Bagaimanakah Proses Pelaksanaan**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar,
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pemerintah desa dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan ilmu-ilmu yang diperoleh penulis selama perkuliahan khususnya ilmu Administrasi Negara.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi serta evaluasi bagi Desa Mayang Pongkai dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes)
- c. Sebagai penambah referensi bagi peneliti lain tentang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (Hanif Nurcholis dkk 2009:97)

Musrenbang desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Musrenbang Desa diadakan sekali dalam setahun yaitu pada bulan januari setiap tahunnya.

Musrenbang desa diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya,
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya; dan
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selain diikuti oleh unsur Pemerintah Daerah juga mengikutsertakan dan yang tak kalah pentingnya menyerap aspirasi masyarakat desa yang terkait.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Desa atau Kelurahan merupakan hal yang sangat substansi dalam pelaksanaan Musrenbang pada tahap Kecamatan sampai pada tahap daerah dan nasional. Sehingga dengan demikian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ditingkat desa haruslah dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga aspirasi masyarakat desa dapat diakomodir dalam pembangunan nasional. Dapat dikatakan juga musrenbang tingkat desa atau kelurahan merupakan ujung tombak dalam perencanaan pembangunan di suatu daerah bahkan nasional.

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa adalah dokumen rencana kerja desa yang berisikan :

- a. Prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh dana alokasi desa dan atau swadaya;
- b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan; dan
- c. Berita acara Musrenbang Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan juga forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan di daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan dalam penyusunan RAPBD tahunan. Penyusunan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara BAPPEDA dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah masing-masing.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman antar pelaku pembangunan tentang RKP dan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar satuan kerja perangkat pemerintah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Peserta Musrenbang Desa adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa seperti Ketua RT/RW, ketua adapt, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kepala sekolah, kepala puskesmas dan lain-lain. Sedangkan narasumber Musrenbang desa adalah kepala Desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala

Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang berada di desa dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Pada saat Musrenbang Desa diupayakan interaktif dialogis, sehingga membuka peluang warga untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka identifikasi masalah maupun potensi yang ada di masyarakat. Untuk memperjelas gambaran situasi yang ada di masyarakat, masalah dan potensi inikemudian dikelompokkan berbagai bidang yaitu bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, serta pelayanan umum.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang meliputi 5 (lima) tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan,
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,
- c. Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota,
- d. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan,
- e. Pelaksanaan Musrenbang Nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 4 ini juga mengatur mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang diselenggarakan dengan 4 (Empat) tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut: ,

1. Tahapan Persiapan adalah kegiatan penetapan jadwal pelaksanaan dan tempat pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbangdes, agenda pembahasan, tim penyelenggara dan calon peserta Musrenbangdes

2. Tahapan Pelaksanaan adalah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang meliputi perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan strategi desa, perumusan kebijakan dan program desa, perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan, pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber, pembahasan rencana kerja dan penyampaian perkiraan-perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber serta penetapan skala prioritas kegiatan Pembangunan sesuai dengan plafon besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fokus penelitian ini adalah tentang seluruh proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perencanaan Daerah di tingkat Desa/Kelurahan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Menurut Handayani (1981: 127) dalam melakukan perencanaan terdapat tata bagian atau unsur perencanaan yang merupakan sistematika berpikir dalam perencanaan yaitu :

1. Hasil akhir (the end) yaitu spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran target perencanaan. Disini ditentukan apa yang ingin dicapai, bilamana kita akan mencapainya,
2. Alat-alat (the means) yaitu meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur dan prakteknya. Disini ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana,
3. Sumber-sumber (the resources) adalah meliputi kuantitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam-macam sumber antara lain tenaga kerja, keuangan, material, tanah dan sebagainya,
4. Pelaksanaan (implementation) yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan dan,
5. Pengawasan (control) adalah menentukan prosedur apa yang akan dilakukan dalam menentukan kesalahan, kegagalan daripada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

Sedangkan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami, baik dari segi ekonomi, sosial politik atau hukum (Nugroho 2006:10).

Lebih lanjut Nugroho (2006:141) mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan antara lain :

- a. Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara sektor ruang dan waktu serta sesuai kepentingan masyarakat

- b. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang disepakati
- c. Menghormati fungsi kelembagaan dan keterlibatan penyelenggara dan masyarakat
- d. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif.

Lebih lanjut Mubyarto (2000 : 246) mengatakan permasalahan dalam penekanan terhadap ketimpangan ekonomi sosial suatu daerah sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah yang memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat khususnya melalui program-program pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

Menurut Mukhtar dan Sajogjo (2001 : 36) dikatakan bahwa Untuk menjawab tantangan pembangunan khususnya ketimpangan pembangunan dan ketimpangan antara golongan *the have* dengan *the have not* maka sekurang-kurangnya pemerintah harus memperhatikan :

- a. Bagaimana caranya meningkatkan kesempatan kerja yang selaras dengan upaya untuk memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor non-migas, terutama hasil laut dan pariwisata
- b. Bagaimana caranya membentuk serta mengembangkan sumber daya yang berkualitas
- c. Bagaimana caranya mengupayakan peningkatan kegiatan ekonomi disektor pertanian
- d. Bagaimana caranya mengurangi jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

- e. Bagaimana caranya meningkatkan, pemeratakan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya.

Menurut Mustofa Djaya (2002:115) proses pembangunan ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu sebagai berikut:

1. Ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan
2. Kebudayaan dan kebiasaan hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan
3. Tingkat kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai bangsa tersebut

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu mengadakan intervensi kebijakan terhadap lingkungan, khususnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ada tiga jenis dasar pelaksanaan pembangunan (Mustofa Djaya 2001:120) yaitu :

1. Pelaksanaan pembangunan secara langsung untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, dimana pemerintah melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pembangunan
2. Pelaksanaan pembangunan tidak langsung adalah berbagai keputusan atau perundang-undangan, pemerintah tidak melakukan sendiri pelaksanaan pembangunan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat sehingga bergerak ke arah yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai pembangunan

3. Pelaksanaan pembangunan campuran adalah pelaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan ataupun campuran keduanya untuk melaksanakan pembangunan secara bersama-sama.

Lebih lanjut dinyatakan Mustofa djaya (2002:121-122) dalam melaksanakan pembangunan disuatu wilayah dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Penyelenggaraan pembangunan fasilitas fisik adalah melaksanakan pembangunan fisik bagi prasarana dan sarana pedesaan untuk kemakmuran seluruh masyarakat seperti penyelenggraan pembangunan jalan, gedung/aula, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya
2. Penyelenggaraan fasilitas umum adalah penyelenggaraan pembangunan fasilitas umum seperti pemeliharaan ketertiban, keamanan, menjalin hubungan yang selaras dan harmonis.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa peningkatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara universal berfungsi melakukan analisa kebijaksanaan untuk mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan yang luas, berkesinambungan serta terus meningkat.

Pelaksanaan pembangunan dari berbagai bentuk pelaksanaan tersebut memerlukan pengendalian yang dapat diartikan sebagai upaya menjaga agar keseluruhan aturan ataupun rencana kegiatan dalam melaksanakan sebagaimana yang ditentukan dengan cara mengikuti atau memantau setiap perkembangan

pelaksanaan, menilai permasalahan yang terjadi, kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut secara efektif yang didukung oleh partisipasi masyarakat setempat.

Menurut SP Siagian (2000:35) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, baik dalam menyumbang uang, pemikiran atau ide maupun dalam bentuk sumbangan tenaga.

Sejalan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan masyarakat desa diharapkan berperan aktif dengan pemerintah desa dalam menyusun program-program pembangunan. Sehingga setiap pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksana akan sangat dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan tersebut akan terpelihara oleh masyarakat.

2.2 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangna untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2003, Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah kabupaten kampar.

Selanjutnya desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja,2002:19)

Sedangkan Menurut Soetardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang kuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.

Desa sebagai organisasi dalam dinamika kegiatan pembangunan tidak bisa luput dari menggunakan dari metode organisasi, administrasi dan manajemen sesuai dengan definisi organisasi yang merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya (Sugiyono, 2004:7) menyatakan Pembangunan Desa adalah seluruh usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan desa.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperjatkan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusianya dan daya dukung sumber dana dan alamnya. Supaya pembangunan desa dapat terealisasi oleh pemerintah daerah, pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat harus

mempunyai kesepakatan yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Desa.

Perencanaan yang baik dalam pembangunan desa harus melibatkan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada dalam desa yang bersangkutan. Sehingga dalam menentukan arah perencanaan pembangunan desa dapat dirumuskan dengan baik sesuai skala prioritas.

Studi yang terkandung dalam setiap sendi kehidupan masyarakat desa adalah adanya perubahan dan pertumbuhan ataupun perkembangan yang terjadi secara terus menerus atau berkesinambungan. Usaha manusia yang dituangkan dalam bentuk kegiatan secara terus menerus agar terjadi perubahan dan perkembangan kearah yang lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki pada umumnya disebut dengan pembangunan.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa itu sendiri. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana, bimbingan serta pengawasan yang di dasarkan kepada keterangan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut sarana infrastruktur yang ada di desa. Adapun persyaratan pembangunan itu adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pembangunan akan lebih cepat diterima bila pembangunan tersebut diusulkan melalui orang-orang yang dihormati
2. Tujuan pembangunan akan diterima bila dirasakan pembangunan tersebut mudah diterima melalui proses belajar yang ada
3. Tujuan dari perubahan sosial dapat diakomodir oleh system nilai dan tradisi yang ada dianggap cukup memuaskan
4. Tujuan pembangunan akan diterima bila hal itu secara menyeluruh sesuai dengan pola-pola kepribadian individu anggota masyarakat.

Desa sebagai organisasi dalam dinamika kegiatan pembangunan tidak bisa luput dari menggunakan metode organisasi, administrasi dan manajemen sesuai dengan definisi organisasi yang merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama.

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
- c. Sekretaris Desa atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Kemudian pada Pasal 208 menjelaskan tentang tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Talizudulu Ndraha (2001:76) tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Membina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang penghayatan dan pengamalan pancasila, pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa yang sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah
3. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih luas
4. Penyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha dan kegiatan masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menciptakan daya guna sebesar-besarnya
5. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga kemasyarakatan
6. Mengusahakan terus menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditaati oleh penduduk desanya.

Dari uraian tugas –tugas diatas jelas betapa besarnya peranan kepala desa dan tanggungjawabnya yang harus dijalankan sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam hal perencanaan pembangunan pemerintah desa harus

lah bersinergi dengan masyarakat supaya hasil dari pembangunan dapat dirasakan sepenuh hati oleh masyarakat desa.

Pemerintah desa merupakan juga simbol formil kesatuan masyarakat desa sebagai kesatuan penduduk, pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri (wewenang otonomi/ pemerintah sendiri) serta wewenang dan kesatuan sebagai pelimpahan serta bertahap dari pemerintah di atasnya.

Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (swadaya) dapat ditumbuhkan melalui partisipasi masyarakat dengan pemerintah desa dimana semangat adalah suatu sikap dari keputusan untuk melanjutkan dan kemampuan untuk menuntut cita-cita dari kelompok atau organisasi.

Jelaslah bahwa peran pemerintah desa yang sangat penting adalah timbulnya kesatuan gerak dan kerjasama yang baik antar sesama aparat serta dalam suatu organisasi pemerintah desa. Terutama lagi dalam pelaksanaan musrenbang ditingkat desa yang sangat menentukan kelanjutan pembangunan dimasa yang akan datang.

2.4 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep

yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa yang disingkat dengan Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan seluruh stakeholder desa baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa maupun pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2. Perencanaan Pembangunan adalah suatu kegiatan perencanaan yang berkenaan dengan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.
3. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
5. Pemerintah Desa adalah terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa lainnya.

2.5 Konsep Operasional

Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut. (Masri Singaribun, 2006:46)

Adapun yang menjadi indikator-indikator Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan dengan item-item sebagai berikut :
 - Penetapan jadwal pelaksanaan
 - Penetapan tempat pelaksanaan
 - Penyusunan agenda pembahasan
 - Penetapan calon peserta
2. Tahapan Pelaksanaan dengan item-item sebagai berikut :
 - Perumusan visi dan misi desa
 - Perumusan tujuan dan strategi desa
 - Perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan desa
 - Perumusan kebijakan dan program desa
 - Pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber
 - Pembahasan rencana rencana kerja
 - Penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan
 - Penyampaian perkiraan-perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2005:70)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta kerangka teori tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Mayang Pongkai diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai belum terlaksana secara optimal karena belum berfungsinya peran stake holder ”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain. (Sugiono, 2005 : 11)

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan setelah ujian seminar proposal.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Data Sekunder yaitu data-data dimana penlulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak yang terkait mengenai Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyeksubyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpukannya. (Sugiono, 2005 : 90)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila polulasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu apa yang dipelajari untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif mewakili. (Sugiyono, 2005 : 91)

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh peserta yang diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Mayang Pongkai yang berjumlah 72 orang yang terdiri dari unsur pemerintahan desa, Kepala Dusun, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan organisasi masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, utusan dari kecamatan, para kepala sekolah yang ada di desa, kepala puskesmas pembantu desa dan pejabat instansi yang ada di desa.

Melihat kecilnya jumlah populasi dari penelitian ini, maka tidak perlu diambil sampelnya. Adapun teknik penarikan sampelnya yaitu dengan sensus.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu peneliti mengadakan Tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh
- b. Quesioner, dalam hal ini penulis menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Mayang Pongkai
- c. Observasi yaitu melakukan peninjauan secara langsung lapangan serta mencatat secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian

3.6 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, maka analisa datanya menggunakan deskriptif kualitatif dengan persentase dan digambarkan pula dalam bentuk kata-kata atau kalimat terpisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hal tersebut dilakukan agar data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis memisah-misahkan data menurut jenisnya. Setelah

data terpisah menurut jenisnya, maka baru dilakukan kegiatan yang dinamakan meneliti data, setelah itu baru dianalisa dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian yang dilengkapi dengan tabel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Tinjauan Sejarah Desa

Desa Mayang Pongkai merupakan salah satu desa Transmigrasi yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kebanyakan dari masyarakat desa Mayang Pongkai pada dasarnya adalah masyarakat yang berasal dari Desa Pongkai yang berada di salah satu desa yang ada di kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan masyarakat asal pulau Jawa. Desa pongkai ini termasuk dari delapan desa yang ada di provinsi Riau yang tenggelam akibat bendungan yang dibangun untuk pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Setelah pemerintah memberikan ganti rugi tanah penduduk yang tenggelam tersebut, pemerintah menawarkan tiga pilihan untuk kelangsungan kehidupan dari masyarakat. Ketiga pilihan itu adalah sebagai berikut:

1. Pindah dengan pola bebas yaitu pindah sendiri kedaerah yang lebih tinggi dan masih berada dalam kawasan Kecamatan XIII Koto Kampar,
2. Pindah dengan pola dua yaitu pindah dengan ditransmigrasikan ke satu daerah dengan membuat atau menanam kebun karet yang akan ditanggung oleh pemerintah biaya kehidupan masyarakat tersebut hingga kebun karetnya menghasilkan dan tanpa dibebankan hutang,
3. Pindah dengan Tran Pir yaitu pindah ke daerah yang telah disiapkan pemerintah lahan perkebunan sawit dengan di bebaskan hutang sebesar Rp

11.000.000/KK selama empat tahun yang akan dibayar dengan hasil perkebunan sawit tersebut dengan cara pemotongan setiap bulan.

Desa Pongkai sendiri akibat tawaran pemerintah diatas terpecah menjadi tiga Desa, yaitu desa pongkai istiqomah yang mengikuti pola pindah bebas berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, desa Pongkai siberuang pindah dengan pola dua juga di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Mayang Pongkai sendiri mengikuti Trans Pir bersama dengan masyarakat yang berasal dari pulau Jawa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Masyarakat pindahan dari desa Pongkai tersebut sampai secara keseluruhan di desa Mayang Pongkai pada tahun 1997. dengan demikian mereka telah berdomisili selama lebih kurang 13 tahun di kawasan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

4.2 Keadaan Geografis

Desa Mayang Pongkai terletak di sebelah utara ibukota Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan luas wilayah 1439 ha. Adapun jarak dari desa Mayang Pongkai dengan ibukota Kecamatan yaitu 3,5 KM. sedangkan jarak ke ibukota Kabupaten 60 KM dan jarak ke ibukota Provinsi 42 KM.

Luas wilayah Desa Mayang Pongkai 1384 ha dengan bentuk tofografi tanah berbentuk daratan, sedangkan batas-batas wilayah Desa Mayang Pongkai yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Sakai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simalinyang

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penghidupan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Plasma

Dengan demikian, desa Mayang Pongkai luas wilayahnya sejak mulai ditempati hingga sekarang tidak pernah berkurang dan bertambah, dari perbatasab-perbatasan dengan desa-desa tetangga lainnya samapai tanah pertanian, perkebunan hingga dengan tanah pekarangan rumah penduduk. Sedangkan keadaan tanahnya yaitu rata dan agak bergelombang.

4. 3 Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk Desa Mayang Pongkai merupakan penduduk yang multi etnis. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ada di desa ini. Mulai dari suku melayu kampar (ocu), jawa, batak hingga sunda hidup di desa Mayang Pongkai ini. Mereka hidup dengan rukun dan saling bantu membantu. Kekompakan antar suku yang mendiami Desa Mayang Pongkai ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang saling bahu-membahu

membangun desa. Untuk lebih jelasnya suku yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.I

Jumlah Penduduk Menurut Etnis yang Ada di Desa Mayang Pongkai

No	Etnis	Jumlah	Persentase
1	Melayu Kampar	2146 orang	65,53%
2	Jawa	945 orang	28,85%
3	Sunda	120 orang	3,66%
4	Batak	64 orang	1,96%
Jumlah		3275 orang	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa masyarakat desa Mayang Pongkai merupakan masyarakat yang heterogen. Terlihat sebanyak empat (4) suku bangsa yang ada di negara kita ini hidup di desa ini. Mayoritas dari penduduk desa Mayang Pongkai adalah masyarakat suku melayu kampar yang berasal dari desa pongkai Kecamatan XIII Koto Kampar yang pindah kedaerah ini, kemudian disusul dari suku Jawa, Sunda dan Batak.

4.4 Kondisi Pendidikan Penduduk

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam suatu wilayah.

Pendidikan juga merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak setiap warga negara (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945)

Untuk lebih jelas tingkat pendidikan penduduk desa Mayang Pongkai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Mayang Pongkai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	40	5,40%
2	SD	260	35,13%
3	SLTP	210	28,38%
4	SLTA	170	22,97%
5	Perguruan Tinggi	60	8,12%
Jumlah		740	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk usia sekolah di Desa Mayang Pongkai mayoritas semuanya sekolah. Hal ini terlihat sekarang bahwa 40 orang atau 5,40% usia sekolah mengeyam pendidikan TK, kemudian 260 atau

sekitar 35,13% penduduk usia sekolah mengeyam pendidikan SD. Selanjutnya 210 atau 28,38% orang penduduk usia sekolah telah mengeyam pendidikan setingkat SLTP dan 170 atau 22,97% orang usia sekolah telah berpendidikan SLTA dan 60 atau 8,12% orang penduduk usia sekolah sedang menempuh pendidikan diberbagai perguruan tinggi.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Mayang Pongkai. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai. pada umumnya gedung-gedung sekolah di Desa Mayang Pongkai telah memadai dan dalam kondisi bagus.

Keadaan yang telah disebutkan diatas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerinta. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Mayang Pongkai

No	Sarana pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	1	16,66%
2	SD	2	33,33%
3	MDA	2	33,33%
4	TK	1	16,66%
Jumlah		6	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Mayang Pongkai berjumlah 6 buah dimana SLTP sebanyak 1 buah atau 16,66%,

SD sebanyak 2 buah (33,33%) dan MDA sebanyak 2 buah (33,33%) serta TK sebanyak 1 buah (16,66%). Dengan adanya sarana pendidikan yang memadai tersebut diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengeyam pendidikan sebagaimana program dari pemerintah yaitu pendidikan wajib 9 tahun.

4.5 Mata Pencaharian Penduduk

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Desa Mayang Pongkai mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani sawit. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Mayang Pongkai

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	1800	80,50%
2	PNS	35	1,57%
3	Pegawai Swasta	15	0,68%
4	TNI/Polri	6	0,26%
5	Buruh Tani	350	15,65%
6	Peternak	6	0,27%
7	Pedagang	20	0,90%
8	Montir	4	0,17%
Jumlah		2236	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel IV.4 diatas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Desa Mayang Pongkai terdapat 1800 orang (80,50%) bekerja sebagai petani, 35 orang (1,57%) bermata pencaharian sebagai PNS, 15 orang (0,68%) sebagai Pegawai Swasta, 6 orang (0,26%) sebagai TNI/Polri. Kemudian sebanyak 350 orang (15,65%) bekerja sebagai Buruh Tani, 6 orang (0,26%) sebagai peternak dan 20 orang (0,90%) bermata pencaharian sebagai Pedagang serta 4 orang (0,17%) berprofesi sebagai montir.

4.6 Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar manusia, kebebasan beragama di negara Republik Indonesia dijamin dalam dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari Pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah negara yaitu pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama yaitu :

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Agama juga merupakan hubungan antara makhluk dengan sang kholiq-Nya. Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkah laku kesehariannya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa agama merupakan pedoman dasar dan

pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syari'at agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Sebab apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai agama, maka masyarakat tersebut akan cepat mendukung perbuatan itu serta sanksi akan diberikan apabila melanggarnya.

Dari data pemeluk agama di Desa Mayang Pongkai terdapat dua agama yang dianut oleh penduduk yaitu Islam dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5

Jumlah Pemeluk Agama di Desa Mayang Pongkai

No	Agama	Jumlah pemeluk	Persentase
1	Islam	3265	99,70%
2	Kristen katolik	10	0,30%
Jumlah		3275	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa agama yang ada di Desa Mayang Pongkai sebanyak 2 agama dimana pemeluk agama Islam sebanyak 3265 orang (99,70%) dan Kristen katolik sebanyak 10 orang (0,30%).

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung sarana tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain tempat

ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat peribadatan yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6

Jumlah Sarana Ibadah di Desa Mayang Pongkai

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	2	20%
2	Mushollah/surau	8	80%
3	Gereja	-	-
4	Wihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat 2 buah mesjid (20%) dan 8 buah mushollah/Surau (80%) sebagai tempat ibadah umat islam. Sedangkan tempat ibadah pemeluk agama lain tidak ada di Desa Mayang Pongkai ini.

4.7 Adat Istiadat

Sebagai kelompok mayoritas, suku melayu kampar berasal dari desa Pongkai, mereka juga mempunyai beberapa suku adapt sebagaimana yang dimiliki oleh seluruh daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang kepala pada masing-masing suku. Kemudian dari

seluruh suku tersebut dikepalai oleh dua orang kepala adat yaitu dengan gelar Datuok Bosau dan Datuok Pobu yang disebut Pucuok Naghoi (Pucuk Negeri).

Adapun suku-suku yang ada di Desa Mayang Pongkai adalah sebagai berikut :

1. Suku Piliang terbagi menjadi dua suku yaitu piliang datuok paduko sindo dan piliang datuok sikuto majo
2. Suku Domo terbagi menjadi tiga suku yaitu Domo Datuok Majo Bosau, Datuok Tan Sumajo dan Domo Datuok Paduko
3. Suku Melayu terbagi pula menjadi tiga suku yaitu Melayu Datuok Eno, Melayu Datuok Sinaro Kayo dan Melayu Datuok Majo Kayo
4. Suku Patopang mempunyai satu orang Datuok yaitu Datuok Jilanso

4.8 Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah Pemerintahan Desa Mayang Pongkai terbagi atas empat Dusun yaitu Dusun Lapangan, Dusun Sungai Putaran dan Dusun Kuala Lumpur serta Dusun Sungai Wien. Sedangkan RT sebanyak 25 dan RW sebanyak 8, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7**Jumlah RT, RW dan Dusun di Desa Mayang Pongkai**

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Putaran Utama	2	7
2	Dusun Lapangan	2	8
3	Dusun Kuala Lumpur	2	6
4	Dusun Sungai Wien	2	4
Jumlah		8	25

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap dusun mempunyai 2 RW, kemudian dusun yang mempunyai jumlah RT terbanyak yaitu Dusun Lapangan sebanyak 8 RT, disusul oleh Dusun Putaran Utama sebanyak 7 RT dan Dusun Kuala Lumpur sebanyak 6 RT serta Dusun Sungai Wien sebanyak 4 RT.

Saat ini Desa Mayang Pongkai dipimpin oleh kepala desa yang bernama Julizar, SP dan dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Muhibbudin. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu pula oleh aparat desa yaitu beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.8**Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Mayang Pongkai**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis kelamin
1	Julizar, SP	Kepala Desa	Sarjana S1	Laki-laki
2	Muhibbudin	Sekretaris Desa	SMA	Laki-laki
3	Afrianto	Kaur Pemerintahan	SMA	Laki-laki
4	Nurma	Kaur Kesra	SMA	Perempuan
5	Tugiman	Kaur Umum	SMA	Laki-laki
6	Jalinus	Kaur Keuangan	SMA	Laki-laki
7	Kaharudin	Kaur Pembangunan	SMA	Laki-laki
Jumlah				7 orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat aparat pemerintahan desa Mayang Pongkai memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik yaitu Kepala Desa seorang Sarjana S1 dan para bawahannya mempunyai jenjang pendidikan tingkat SLTA, sehingga dengan demikian diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai pelayan masyarakat serta dalam perencanaan pembangunan.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat penting bagi suatu daerah merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan desa untuk diusulkan pada Musyawarah tingkat berikutnya sampai menghasilkan suatu peraturan daerah yang akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang berjumlah sebanyak 72 orang.

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai identitas responden, maka penulis menyebarkan kuesioner kepada masing-masing responden. Berikut ini disajikan profil responden yang dikelompokkan atas umur, pendidikan, jenis kelamin tiap- tiap responden.

5.1 Identitas Responden

Adapun identitas responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.1.1 Golongan Umur

Untuk mengetahui pengelompokkan umur setiap responden dari jumlah keseluruhan responden yang berjumlah 70 orang dibagi berdasarkan tingkatan-tingkatan umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1**Identitas Responden Berdasarkan Pengelompokkan Umur**

No	Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	21 – 30	4	5,56%
2	31 – 40	22	30,55%
3	41 – 50	25	34,72%
4	51 – 60	18	25%
5	61 – 70	3	4,17%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel V.1 di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara 21-30 tahun berjumlah 4 orang atau 5,56%, responden yang berumur antara 31-40 berjumlah 22 orang atau 30,55%. Sedangkan responden yang berumur antara 41-50 berjumlah 25 orang atau 34,72%, responden yang berumur antar 51-60 berjumlah 18 orang atau 25% dan responden yang berumur antara 61-70 adalah berjumlah 3 orang atau 4,17% saja.

Dari keterangan tabel V.1 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar umur responden adalah berada pada usia produktif artinya usia yang paling enerjik baik dalam berfikir maupun dalam bekerja.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah menunjukkan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh responden yaitu mulai dari tingkat pendidikan paling bawah sampai

ketingkat pendidikan paling tinggi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	6	8,33%
2	SLTP/Sederajat	18	25%
3	SLTA/Sederajat	35	48,61%
4	D.III	4	5,55%
5	S.1	8	11,11%
6	Pasca Sarjana	1	1,39%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak pada pada tingkatan SLTA/Sederajat yang berjumlah 35 orang atau 48,61%,kemudian disusul oleh responden yang berpendidikan pada tingkat SLTP/Sederajat yaitu berjumlah 18 orang atau 25%. Selanjutnya disusul oleh responden yang berpendidikan pada tingkat sarjana Strata Satu(S.1) berjumlah 8 orang atau 11,11%, responden yang berpendidikan sekolah dasar (SD) berjumlah 6 orang atau 8,33% serta responden yang berpendidikan pada tingkat Pasca Sarjana yaitu hanya 1 orang saja atau 1,39%.

Dari keterangan tabel V.2 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas tngkatan pendidikan responden adalah SLTA/Sederajat dan

SLTP/Sederajat dan diurutan ketiga adalah Sarjana Strata satu, sehingga dalam memahami perencanaan pembangunan dan dalam bekerja lebih mudah menguasai dan mempunyai kreatifitas dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah.

5.1.3 Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel V.3

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	45	62,5%
2	Perempuan	27	37,5%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai adalah laki-laki berjumlah sebanyak 45 orang atau 62,5% dan perempuan sebanyak 27 orang atau 37,5%.

Jenis Pekerjaan

Adapun jenis pekerjaan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4**Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	54	75%
2	PNS/Pegawai Swasta	18	25%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas diketahui jenis pekerjaan responden yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Swasta sebanyak 18 orang atau 25% dan responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 54 orang atau 75%.

5.1.5 Jumlah Peserta dan Narasumber

Adapun jumlah peserta dan Narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5**Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Peserta dan Narasumber**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Peserta	64	88,89%
2	Narasumber	8	11,11%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta dalam Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai sebanyak 64 orang atau 88,89% sedangkan narasumber

berjumlah 8 orang atau 11,11%. Untuk narasumber dalam Musrenbangdes ini bersal dari utusan kecamatan, pihak pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5.2 Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan suatu forum musyawarah tahunan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya yang kemudian diajukan kepada Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) pada tingkat berikutnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi oleh desa yang bersangkutan.

Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional dinegara kita ini, oleh karena itu perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan dan pertimbangkan secara matang. Keberhasilan pembangunan nasional kita akan terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan.

Melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini diharapkan pembangunan desa dapat digesa oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga diharapkan tidak ada lagi desa yang terkebelakang dan terisolasi di negara yang kita cintai ini.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar penulis menetapkan dua indikator penelitian yaitu sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terdapat empat kegiatan prioritas yaitu :

1. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musrenbangdes

Penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dilaksanakan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hanya pada bulan Januari saja. Untuk itu Pemerintahan Desa Mayang Pongkai harus bertindak secepat mungkin menetapkan jadwal pelaksanaan demi program pembangunan desa setiap tahunnya yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat selanjutnya.

Berdasarkan observasi langsung penulis dilapangan terlihat bahawa penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) setiap tahunnya sering terjadi penundaan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada rapat persiapan musrenbangdes antara

pihak Pemerintahan Desa Mayang Pongkai dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu sendiri masih dilaksanakan pada bulan Januari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, tetapi penundaan jadwal itu hanya harinya saja yang digeser.

Penundaan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) pada tahun 2010 ini dikarenakan bahwa ada suatu permasalahan yang sangat penting diselesaikan oleh pihak pemerintahan desa Mayang Pongkai yaitu terjadinya tauran pemuda desa Mayang Pongkai dengan pemuda desa tetangga. Oleh karena itu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diundur harinya. (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Mayang Pongkai yaitu Bapak Julizar,SP pada tanggal 20 Februari 2010)

Kemudian dapat kita lihat pula jawaban dari responden mengenai penetapan jadwal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada tabel berikut ini :

Tabel V.6

**Jawaban Responden Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pada Tahapan
Persiapan Musrenbangdes**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	18	25%
2	Cukup baik	25	34,22%
3	Kurang baik	29	40,28%
Jumlah		72	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai pada kategori "Baik" sebanyak 18 orang responden atau 25% dan tanggapan responden pada kategori "Cukup Baik" sebanyak 25 orang atau 34,22% , sedangkan pada kategori "Kurang Baik" berjumlah sebanyak 29 orang atau 40,28%.

Penjelasan tabel diatas mengenai penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada tahapan persiapan dapat disimpulkan yaitu berada pada kategori kurang baik dimana 29 orang responden dari 72 orang responden penelitian ini memberikan jawaban kurang baik.

2. Penetapan Tempat Pelaksanaan Musrenbangdes

Pada tahapan penetapan tempat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai menurut pengamatan penulis dilapangan tidak begitu terjadi kendala dalam penetapan tempatnya. Ini terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya tempat yang digunakan adalah ruangan aula Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai itu sendiri.

Sejalan dengan fenomena yang terjadi dilapangan tersebut diatas, responden memberikan jawaban mengenai penetapan tempat pelaksanaan musrenbangdes sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel V.7

**Jawaban Responden Tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Pada
Tahapan Persiapan Musrenbangdes**

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	15	20,83%
2	Cukup Baik	29	40,28%
3	Kurang Baik	28	38,89%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai penetapan tempat pelaksanaan pada Tahapan Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai yaitu responden yang memberikan jawaban "Baik" sebanyak 15 orang atau 20,83% dan responden yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 29 orang atau 40,28% sedangkan responden yang memberikan jawaban "Kurang Baik" sebanyak 28 orang atau 38,89%.

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tempat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai adalah cukup baik, dimana 29 orang dari seluruh responden menjawab cukup baik. Sedangkan yang menjawab baik hanya 15 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 28 orang responden dari keseluruhan responden.

3. Penyusunan Agenda Pembahasan Sebagai Bahan Musrenbangdes

Pada tahapan penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terlihat bahwa pihak Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa Mayang Pongkai memberikan tugas kepada Sekretaris Desa (Sekdes) beserta stafnya untuk menyusunnya sangat lamban menyelesaikan tugasnya. Hal ini penulis melihat bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) kurang berpengalaman dalam hal ini dan juga kemampuan komputer beliau kurang bagus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Mayang Pongkai pada tanggal 20 Februari 2010 di Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai, beliau mengatakan bahwa untuk penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini perlu kemampuan komputer yang bagus, karena semua bahannya berhubungan dengan ketik mengetik menggunakan komputer. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan sangat rumit, sehingga para penyusunnya harus bekerja ekstra.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden mengenai penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8

**Jawaban Responden Tentang Penyusunan Agenda Pembahasan Sebagai
Bahan Musrenbangdes**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	25	34,72%
3	Kurang Baik	27	37,5%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang memberikan jawaban "Baik" pada penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musrenbangdes adalah sebanyak 20 orang atau 27,78%, selanjutnya yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 25 orang atau 34,72% dan yang memberikan jawaban "Kurang Baik" adalah sebanyak 27 orang atau 37,5%.

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dikategorikan Kurang baik. Hal ini dikarenakan terlalu lamanya pihak pemerintahan desa dalam menyusun agenda pembahasan sebagai bahan Musrenbangdes.

4. Penetapan Calon Peserta Musrenbangdes

Pada penetapan calon peserta Musrenbangdes penulis melihat bahwa, peserta yang diundang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di desa mayang pongkai. Terutama sekali kami yang terhimpun dalam

Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Desa Mayang Pongkai (Hipemapo) tidak pernah diundang pada pelaksanaan Musrenbangdes. Padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Desa Mayang Pongkai itu sendiri. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di desa Mayang Pongkai mengenai penetapan calon peserta secara keseluruhan telah mewakili unsur-unsur yang ada di desa.

Namun berbeda dengan pendapat responden mengenai jawaban responden mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes pada tahapan persiapan, mayoritas responden memberikan jawaban cukup baik. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9

**Jawaban Responden Tentang Penetapan Calon Peserta Pada Tahapan
Persiapan Musrenbangdes**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	15	20,83%
2	Cukup Baik	34	47,22%
3	Kurang Baik	23	31,94%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.9 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab "Baik" mengenai penetapan calon peserta Musrenbangdes adalah sebanyak 15 orang atau 20,83%, selanjutnya yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 34 orang atau 42,22% dan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 23 orang atau 31,94%.

Berdasarkan keterangan tabel diatas memberikan gambaran bahwa dalam menetapkan calon peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) cukup baik.

B. Tahapan Pelaksanaan

Kemudian setelah persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) selesai, maka diselenggarakanlah tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dibuka oleh Kepala Desa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan agenda pembahasan pada tahapan pelaksanaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Visi dan Misi Desa

Perumusan visi dan misi suatu perencanaan pembangunan desa sangatlah menentukan arah pembangunan desa yang akan datang, baik rencana pembangunan jangka pendek dan menengah desa maupun rencana pembangunan

jangka panjang desa. Oleh sebab itu, perumusan visi dan misi desa harus diperhitungkan secermat mungkin sesuai dengan zaman yang maju sekarang ini.

Visi dan misi desa merupakan pandangan umum dalam setiap pembangunan desa, karena akan menentukan pembangunan desa dimasa yang akan datang. Visi desa yang baik akan menentukan keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

Adapun jawaban responden mengenai perumusan visi dan misi pada tahapan dalam pelaksanaan Musrenbangdes dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10

**Jawaban Responden Tentang Perumusan Visi dan Misi Dalam Tahapan
Penyusunan Dokumen Musrenbangdes**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	19	26,39%
2	Cukup Baik	22	30,56%
3	Kurang Baik	31	43,05%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden "Baik" tentang perumusan visi dan misi dalam tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah sebanyak 19 orang atau 26,39% dan responden yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 22 orang atau 30,56%. Sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" sebanyak 31 orang atau 43,05%.

2. Perumusan Tujuan dan Strategi Desa Mayang Pongkai dalam Musrenbangdes

Adapun jawaban responden tentang perumusan tujuan dan strategi dalam tahapan penyusunan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11

Jawaban Responden Tentang Perumusan Tujuan dan Strategi Desa dalam Pelaksanaan Musrenbangdes

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	22	30,56%
3	Kurang Baik	30	41,67%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dilihat jawaban responden tentang perumusan tujuan dan strategi desa dalam Musrenbangdes termasuk kategori "Baik" berjumlah 20 orang atau 27,78% dan yang menjawab "Cukup Baik" berjumlah 22 orang atau 30,56%, sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" berjumlah sebanyak 30 orang atau 41,67%.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat diberikesimpulan bahwa pada perumusan tujuan dan strategi desa dikategorikan kurang baik dimana mayoritas responden yaitu sebanyak 30 orang atau 41,67% menjawab kurang baik.

Hal tersebut diatas sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

yaitu Bapak Tugiman pada Tanggal 07 Maret 2010, beliau mengatakan bahwa dalam perumusan tujuan dan strategi desa sangat global/umun sekali. Sekarang yang diinginkan desa adalah benar-benar yang sangat mendesak sekali untuk dibangun dibangun.

3. Perumusan Kebijakan dan Program Desa

Untuk mengetahui jawaban responden tentang perumusan kebijakan dan program desa pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.12

Jawaban Responden Tentang Perumusan Kebijakan dan Program Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	14	19,44%
2	Cukup Baik	26	36,11%
3	Kurang Baik	32	44,44%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.12 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang perumusan kebijakan dan program pada tahapan pelaksanaan Musrenbangdes sebanyak 14 orang atau 19,44% dan yang menjawab "Cukup Baik" sebanyak 26 orang atau 36,11%, sedangkan yang menjawab "Kurang Baik" yaitu sebanyak 32 orang atau 44,44%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan program dan kebijakan Desa Mayang Pongkai pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dikategorikan kurang baik.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi penulis pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), bahwa terlihat hanya beberapa orang saja yang begitu vocal dalam memberikan usulan mengenai perumusan Program dan kebijakan desa dimasa yang akan datang.

4. Perumusan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan desa tergambar oleh penulis pada saat mengikuti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bahwa terlalu banyak para peserta mengusulkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di masing-masing Dusun. Sedangkankan kalau kita koreksi kegiatan-kegiatan yang mereka ajukan tersebut tidak begitu penting sekali. Namun dalam merumuskan kegiatan tersebut penulis menilai cukup baik dan pihak pemerintah desa dengan kecamatan begitu selektif dalam merumuskan kegiatan pembangunan desa.

Kemudian Untuk mengetahui jawaban responden tentang perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan desa pada tahapan penyusunan dokumen dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.13

**Jawaban Responden Tentang Perumusan Kegiatan-kegiatan Pembangunan
Desa**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	26	36,11%
2	Cukup Baik	27	37,50%
3	Kurang Baik	19	26,39%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan desa berjumlah sebanyak 26 orang atau 36,11% dan yang menjawab "Cukup Baik" adalah sebanyak 27 orang atau 37,50% serta yang menjawab "Kurang Baik" adalah sebanyak 19 orang atau 26,39%.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tentang perumusan kegiatan pembangunan desa dikategorikan cukup baik, dimana dari 72 orang responden memberikan jawaban cukup baik yaitu sebanyak 27 orang responden.

5. Pemaparan Rencana Kerja Masing-masing Narasumber

Pemaparan rencana kerja merupakan pemaparan yang dilakukan oleh para narasumber seperti Kepala Desa, Camat serta Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam menentukan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) Desa

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, terlihat bahwa para narasumber dalam memaparkan rencana kerja begitu jelas. Sehingga kita yang mendengarnya dapat mengerti dengan baik untuk kemudian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat berpikir menyusun rencana berdasarkan pemaparan rencana kerja para narasumber .

Hal diatas sejalan dengan jawaban responden mengenai pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber. Mayoritas responden memberikan jawaban baik narasumber dalam memaparkan rencana kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.14

Jawaban Responden Tentang Pemaparan Rencana Kerja oleh Masing-masing Narasumber

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	30	41,67%
2	Cukup Baik	15	20,83%
3	Kurang Baik	27	37,50%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.14 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab baik dalam pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber adalah sebanyak 30 orang atau 41,67% dan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 15 orang atau

20,83%, sedangkan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 27 orang responden atau 37,50%.

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemaparan rencana kerja para narasumber dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan para narasumber dalam penyampaiannya begitu jelas dengan alasan-alasannya.

6. Pembahasan Rencana Kerja

Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pembahasan rencana kerja ini akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pembahasan rencana kerja dalam tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.15

Jawaban Responden Tentang Pembahasan Rencana Kerja

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	20	27,78%
2	Cukup Baik	28	38,89%
3	Kurang Baik	24	33,33%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.15 terlihat bahwa responden yang menjawab baik tentang pembahasan rencana kerja adalah sebanyak 20 orang atau 27,78% dan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 28 orang atau 38,89% sedangkan yang menjawab Kurang Baik adalah sebanyak 24 orang atau 33,33%.

Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan rencana kerja termasuk pada kategori cukup baik, dimana 28 orang responden atau 38,89% dari 72 orang responden menjawab cukup baik.

7. Penetapan Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan menjadi hal yang sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan, kegiatan-kegiatan yang ditetapkan akan dilanjutkan ketingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berikutnya. Apakah kegiatan tersebut dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar atau dibiayai oleh swadaya masyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu dalam penetapan skala prioritas pembangunan harus memperhatikan kebutuhan yang mendasar bagi desa sekarang ini. Sehingga usulan pembangunan pada tingkat selanjutnya dapat terealisasi 100%.

Kemudian Untuk mengetahui jawaban responden tentang penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.16
Jawaban Responden Tentang Penetapan Skala Prioritas Kegiatan
Pembangunan

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	13	18,05%
2	Cukup Baik	28	38,89%
3	Kurang Baik	31	43,06%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab "Baik" tentang penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan adalah sebanyak 13 orang atau 18,05% dan yang memberikan jawaban "Cukup Baik" sebanyak 28 orang atau 38,89% dan yang memberikan jawaban "Kurang Baik" adalah sebanyak 31 orang atau 43,06%, sedangkan yang menjawab "Baik" adalah sebanyak 13 orang atau 18,05%.

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat diberikan gambaran bahwa dalam penetapan skala prioritas pembangunan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu kurang baik. Hal ini sejalan dengan latar belakang masalah penelitian ini yaitu para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tidak mampu menetapkan skala prioritas pembangunan desa Mayang Pongkai, sehingga program-program yang diajukan hanya beberapa saja yang terealisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.

Hal tersebut diatas tidak sejalan dengan penyampaian dari narasumber dari pihak Kecamatan Kampar Kiri Tengah bahwa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan harus mengedepankan yang lebih mendesak dilaksanakan atau dibangun sehingga program itu bisa terealisasi.

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Mayang Pongkai yaitu Bapak Julizar, SP pada tanggal 10 maret 2010 di Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai beliau mengatakan bahwa, dalam menetapkan skala prioritas pembangunan desa pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masing-masing peserta terutama para Kepala Dusun (Kadus) bersikeras untuk memasukkan program-program mereka yang kalau dicermati program tersebut tidak penting dibandingkan dengan program yang telah diajukan oleh pihak desa sendiri. Untuk sebagai contohnya yaitu pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lebih lanjut bapak Kepala Desa memaparkan kepada penulis. Kalau dicermati tidak begitu penting karena bisa saja digunakan balai desa sebagai pelaksanaan Posyandu tersebut dibandingkan dengan pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dimana para muridnya menumpang belajar sore digedung SDN 044 Desa Mayang Pongkai.

8. Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan Dari Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat diharapkan penjelasannya. Karena para narasumberlah yang mengetahui alokasi-alokasi anggaran dari pemerintah daerah.

Oleh sebab itu narasumber diharapkan mampu membawa para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kearah yang lebih baik lagi.

Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) begitu bagus. Para narasumber menjelaskannya begitu gamlang dan jelas. Para narasumber menjelaskan kemampuan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, sehingga para peserta mengerti seberapa besar kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Kemudian narasumber memberikan gambaran bahwa, pendanaan pembangunan desa tidak 100% dari dana Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Provinsi Riau, namun pemerintah desa beserta masyarakat harus berpartisipasi dalam mencari kekurangan pendanaan tersebut. Dana yang dimiliki pemerintah sangat minim sekali, untuk itu perlu swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Masyarakat diharapkan bahu membahu dalam setiap kegiatan pembangunan desa dengan pemerintahan desa. Apalagi dengan hak otonomi desa yang dimiliki desa bertujuan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa lebih mandiri lagi.

Selanjutnya Untuk mengetahui jawaban responden tentang penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murenbangdes) di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.17

**Jawaban Responden Tentang Penyampaian Perkiraan Kemampuan
Pendanaan Dari Narasumber**

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	28	38,89%
2	Cukup Baik	27	37,50%
3	Kurang Baik	17	23,61%
Jumlah		72	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang menjawab Baik tentang penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber adalah sebanyak 28 orang atau 38,89% dan yang memberikan jawaban Cukup Baik adalah sebanyak 27 orang atau 37,50%, sedangkan yang memberikan jawaban Kurang Baik hanya 17 orang atau 23,61% saja dari seluruh responden.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab baik pada penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber pada tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan alasan bahwa narasumber dalam menyampaikan materinya sangat lugas dan tegas serta membuka cakrawala pemikiran dari para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyampaikan pendapat masing-masing.

5.3 Rekapitulasi Seluruh Jawaban Responden

Selanjutnya dapatlah disimpulkan rekapitulasi jawaban responden mengenai Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sebagai berikut ini :

Tabel V.18

**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tahapan Persiapan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa
Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar**

No	Tahapan Persiapan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penetapan Jadwal	18(25%)	25(34,22%)	29(40,28%)	72(100%)
2	Penetapan Tempat	15(20,83%)	29(40,28%)	28(38,89%)	72(100%)
3	Penyusunan Agenda	20(27,78%)	25(34,72%)	27(37,50%)	72(100%)
4	Penetapan Calon Peserta	15(20,83%)	34(47,22%)	23(31,94%)	72(100%)
Jumlah		68(23,61%)	113(39,23%)	107(37,16%)	288(100%)

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam tahapan persiapan Musrenbangdes responden memberikan jawaban baik sebanyak 68 orang responden atau 23,61%, sedangkan responden yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 113 orang atau 39,23% serta yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 107 orang atau 37,16%.

Kemudian dari keterangan tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai tahapan persiapan Musrenbangdes diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan persiapan Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai berada pada kategori cukup baik 39,23% dari seluruh jawaban responden.

Selanjutnya rekapitulasi jawaban responden mengenai tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai berikut ini :

Tabel V.19

**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tahapan Pelaksanaan
Musrenbangdes Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar**

No	Tahapan Pelaksanaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perumusan Visi dan Misi	19(26,39%)	22(30,56%)	31(43,05%)	72(100%)
2	Perumusan Tujuan Dan Strategi Desa	20(27,78%)	22(30,56%)	30(41,67%)	72(100%)
3	Perumusan Kebijakan dan Program Desa	14(19,44%)	26(36,11%)	32(44,44%)	72(100%)
4	Perumusan Kegiatan-kegiatan Pembangunan	26(36,11%)	27(37,50%)	19(26,39%)	72(100%)
5	Pemaparan Rencana Kerja Masing-masing	30(41,67%)	15(20,83%)	27(37,50%)	72(100%)
6	Narasumber Pembahasan	20(27,78%)	28(38,89%)	24(33,33%)	72(100%)
7	Rencana Kerja Penetapan	13(18,05%)	28(38,89%)	31(43,06%)	72(100%)
8	Skala Prioritas Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan Dari Narasumber	28(38,89%)	27(37,50%)	17(23,61%)	72(100%)
Jumlah		170(29,51%)	195(33,85%)	211(36,63%)	576(100%)

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.19 rekapitulasi jawaban responden mengenai tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai diatas terlihat bahwa responden yang memberikan jawaban baik sebanyak 170 orang atau 29,51% dan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 195 orang atau 33,85% serta yang memberikan jawaban kurang baik yaitu sebanyak 211 orang atau 36,63%.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada tahapan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai berada pada kategori kurang baik dimana secara keseluruhan yaitu sebanyak 211 orang responden atau 36,63% menjawab kurang baik.

5.3 Hambatan-hambatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Dari hasil penelitian dilapangan atau observasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), proses pelaksanaan Musrenbangdes terjadi beberapa hambatan-hambatan yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga dalam pelaksanaan menemui banyak kendala.
2. Kurangnya koordinasi Kepala Desa Mayang Pongkai serta sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat (Stakeholder) dalam mensukseskan

pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya.

3. Partisipasi para peserta yang telah ditetapkan dan telah diberikan undangan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat kurang sekali. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir hanya 70% dari seluruh undangan yang telah disampaikan oleh pihak Pemerintahan Desa Mayang Pongkai.

BAB VI

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menguraikan tentang hasil penelitian mengenai Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, pada bab ini penulis juga mengemukakan kesimpulan dan sara-saran dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan responden dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada Tahapan Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori cukup baik yaitu sebanyak 39,23%, dimana secara keseluruhan kategori ini berada pada jumlah tertinggi dibandingkan dengan kategori baik dan cukup baik.
- 2) Pada Tahapan Pelaksanaan Musrenbangdes dapat disimpulkan yaitu berada pada kategori kurang baik atau 36,63%.
- 3) Hambatan-hambatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai yaitu :
 - a. Masih rendahnya tingkat pendidikan peserta Musrenbangdes di Desa Mayang Pongkai sehingga dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes terjadi kendala.

- b. Kurangnya koordinasi serta sosialisasi Kepala Desa dengan seluruh elemen masyarakat (stakeholder) dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat atau peserta dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai.

6.2 Saran-Saran

- 1) Kepada pihak Pemerintahan Desa Mayang Pongkai agar pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dimasa yang akan datang lebih baik lagi dibandingkan sekarang ini.
- 2) Kepada seluruh elemen masyarakat desa Mayang Pongkai agar berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah
- 3) Kepada pembaca yang budiman diminta kritik dan saran yang membangun demi terciptanya sistem pembelajaran yang efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Mustofa, *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan Teori Dan Harapan*, Liberty, Jakarta, 2002
- Handayaniingrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, CV. Haji Mas Agung, 2003
- Kaho, Riwo, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo, 2001
- Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Ndraha, Talizuluhu, *Peranan Administrasi Desa Dalam Pembangunan*, Yayasan Dharma IIP, Jakarta, 2001
- Nugroho, Ryant, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Nurcholis, Hanif, dkk, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009
- Sugiyono, Prof, DR, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2005
- Sajogjo dan Mukhtar, *Masalah Penanggulangan Kemiskinan (Refleksi Dari Kawasan Timur Indonesia)*, Jakarta, PT. Puspa Swara, 2001
- Siagian, SP, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2004

Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa / Marga*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Yusron, Andi, *Desentralisasi Di Indonesia (Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin)*, Suska Press & Red-Post Press, Pekanbaru, 2007

PERATURAN-PERATURAN

UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU. No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Desa

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 0259/m. ppn/I/2005, 050/166/AJ Perihal Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Surat keterangan telah mengadakan penelitian di Desa Mayang Pongkai
3. Surat rekomendasi izin riset dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau
4. Surat bimbingan skripsi
5. Surat izin riset dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Rencana Target dan Realisasi Program Pembangunan di Desa Mayang Pongkai	5
Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Etnis Yang Ada di Desa Mayang Pongkai	34
Tabel IV.2 : Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Mayang Pongkai	35
Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Mayang Pongkai	36
Tabel IV.4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Mayang Pongkai	37
Tabel IV.5 : Jumlah Pemeluk Agama di Desa Mayang Pongkai	39
Tabel IV.6 : Jumlah Sarana Ibadah di Desa Mayang Pongkai	40
Tabel IV.7 : Jumlah RT, RW, dan Dusun di Desa Mayang Pongkai	42
Tabel IV.8 : Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Mayang Pongkai	43
Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Pengelompokan Umur	45
Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel V.4 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	48
Tabel V.5 : Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Peserta dan Narasumber	48
Tabel V.6 : Jawaban Responden Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musrenbangdes	51
Tabel V.7 : Jawaban Responden Tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Musrenbangdes	53
Tabel V.8 :Jawaban Responden Tentang Penyusunan Agenda Pembahasan Sebagai Bahan Musrenbangdes	55

Tabel V.9 : Jawaban Responden Tentang Penetapan Calon Peserta Musrenbangdes	56
Tabel V.10 : Jawaban Responden Tentang Perumusan Visi dan Misi Desa	58
Tabel V.11 : Jawaban Responden Tentang Perumusan Tujuan dan Strategi Desa	59
Tabel V.12 : Jawaban Responden Tentang Perumusan Kebijakan dan Program Desa	60
Tabel V.13 : Jawaban Responden Tentang Perumusan Kegiatan-kegiatan Pembangunan Desa	62
Tabel V.14 : Jawaban Responden Tentang Pemaparan Rencana Kerja Oleh Masing-masing Narasumber	63
Tabel V.15 : Jawaban Responden Tentang Pembahasan Rencana Kerja	64
Tabel V.16 : Jawaban Responden Tentang Penetapan Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan	66
Tabel V.17 : Jawaban Responden Tentang Penyampaian Perkiraan Kemampuan Pendanaan dari Narasumber	69
Tabel V.18 : Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tahapan Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	70
Tabel V.19 : Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	71

DAFTAR KUESIONER

JUDUL SKRIPSI:

“Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”

1. IDENTITAS PENULIS

- a. Nama : Rustam Efendi
- b. Nim : 10675005125
- c. Jurusan : Administrasi Negara FEKONSOS UIN SUSKA RIAU
- d. Alamat : Desa Mayang Pongkai

2. PETUNJUK PENGISIAN :

- 1. Kepada Bapak/Ibu/Sdr/I diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang ada dengan jujur dan sebenarnya
- 2. Lingkari salah satu jawaban yang dipilih
- 3. Ada tiga pilihan jawaban yaitu:
 - a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Kurang Baik

3. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan :
- f. Peserta/narasumber :

DAFTAR KUESIONER

JUDUL SKRIPSI:

“Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”

1. IDENTITAS PENULIS

- a. Nama : Rustam Efendi
- b. Nim : 10675005125
- c. Jurusan : Administrasi Negara FEKONSOS UIN SUSKA RIAU
- d. Alamat : Desa Mayang Pongkai

2. PETUNJUK PENGISIAN :

- 1. Kepada Bapak/Ibu/Sdr/I diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang ada dengan jujur dan sebenarnya
- 2. Lingkari salah satu jawaban yang dipilih
- 3. Ada tiga pilihan jawaban yaitu:
 - a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Kurang Baik

3. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan :
- f. Peserta/narasumber :